Mengajarkan Modernitas:
PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan

Ruth T. McVey

Kata Pengantar: John Roosa

INDOPROGRESS

Mengajarkan Modernitas: PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan

Ruth T. McVey

Kata Pengantar: John Roosa

INDOPROGRESS
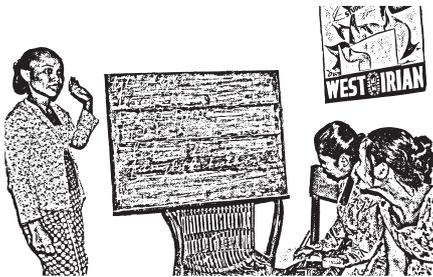
Judul asli: Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution
Pengarang: Ruth T. McVey
Penerjemah: Fathimah Fildzah Izzati dan Fitri Mohan
Editor: Coen Husain Pontoh
Desain sampul dan isi: Alit Ambara

Keterangan foto sampul: Pemberantasan Buta Huruf oleh Gerwani cabang Gambir Ranting Halimun, 1962. Foto koleksi Oey Hay Djoen.

Terbit pertama kali di jurnal INDONESIA, Volume 50, October 1990, Cornell University's Southeast Asia Program. Dalam versi Indonesia, artikel ini terbit pertama kali di IndoPROGRESS Jurnal Pemikiran Marxis, Vol. II, Nomor 4, 2015
Diterbitkan oleh Pustaka IndoPROGRESS, 2016

Diterbitkan oleh Pustaka IndoPROGRESS, 2016

Daftar Isi:

Sukarno mengajarkan literasi pada sekitar awal tahun 1950an

Kata Pengantar

John Roosa

SIAPAKAH PKI? Jika Anda mengikuti propaganda Orde Baru, Anda akan membayangkan mereka semacam monster dengan kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa – 27 juta orang tergabung bersama dalam satu organisme besar, dan semua dari mereka, ibarat sel-sel di dalam tubuh, dikuasai oleh satu pusat otak: Politbiro. Dalam bahasa Orde Baru, PKI selalu tampak sebagai satu hal: "PKI kejam," "PKI sadis," dan sejenisnya. Orang menggambarkan The Borg di *Star Trek* yang mengikat setiap satu orang ke dalam satu jaringan, melucuti mereka semua dari individualitas mereka, dan mengubah mereka menjadi drone, kemudian mereka bertingkah laku sebagai satu kolektif terpadu yang utuh: setiap drone dikendalikan setiap saat oleh "pikiran kolektif" dari The Borg. Propaganda rezim Suharto menggambarkan PKI sebagai mereka yang terorganisir dengan sangat baik, sehingga mereka mampu melakukan pencapaian-pencapaian luar biasa; PKI bukanlah partai politik biasa. Entah bagaimana, Politbiro bisa secara rahasia memerintahkan semua jutaan anggotanya di semua daerah di Indonesia untuk menggali kuburan massal, mengumpulkan alat pencongkel mata, dan kemudian menyiapkan sebuah pemberontakan, dan tak ada seorang pun di negara ini, bahkan tak seorang pun agen intelijen tentara, yang mengetahui apapun tentang rencana pemberontakan ini.

Kita baru-baru ini ditunjukkan contoh propaganda sejenis semacam di atas. Pada bulan Mei 2016, Mayjen (Purn.) Kivlan Zen mengklaim bahwa PKI secara diam-diam telah mendaftarkan 15 juta orang, mengumpulkan sejumlah besar uang, dan siap untuk kembali mendeklarasikan keberadaannya di bekas markasnya di bawah kepemimpinan Wahyu Setiaji (tak ada satu pun yang pernah mendengar atau bisa menemukan orang ini). Tampaknya orang-orang PKI punya semacam kemampuan gaib untuk bergerak seperti hantu, tanpa ada yang tahu, dan kemudian tiba-tiba saja muncul tak ketahuan darimananya. Seperti *shapeshifters* (makhluk yang

bisa berubah bentuk) di *Star Trek*, PKI adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Setelah 50 tahun dihabisi tanpa ampun, PKI masih dianggap sangat berkuasa, seperti penjahat yang tak terkalahkan dalam cerita-cerita superhero.

Tentu saja, cerita Zen ini sungguh absurd, namun tak ada yang jauh lebih absurd dari propaganda Orde Baru tentang PKI yang hingga hari ini masih diperlakukan sebagai kebenaran oleh banyak orang. Setiap anggota PKI masih dianggap bersalah atas Gerakan 30 September tahun 1965, sebuah aksi konspiratif skala kecil yang singkat, dan pantas mendapatkan hukuman mati secara kolektif. Apa yang lebih absurd – dan kejam – dari anggapan semacam itu? Kelompok pejabat-pejabat Suharto di dalam tubuh komando tinggi tentara menyusun sebuah kampanye perang psikologis melawan PKI dimulai sejak awal Oktober 1966 dan kampanye tersebut tak pernah sekalipun berhenti.

Di tengah-tengah dekade salah informasi tentang PKI, hampir tidak mungkin saat ini untuk memahami sejarah PKI sebagai sebuah organisasi yang terdiri atas orang-orang yang nyata, yang punya darah dan daging di dalam tubuhnya. Sungguh, jika ada orang yang berani menulis tentang anggota PKI seolah mereka bukanlah monster, maka dia mau tak mau akan dituduh sebagai "pro-PKI." Masyarakat Indonesia telah terbiasa memperlakukan tiap individu yang dulunya "PKI" dengan cara yang sama seperti para penyihir di *Harry Potter* bicara tentang Lord Voldemort, sebagai "Dia Yang Tak Boleh Disebut Namanya." Orang-orang ini tak boleh dinamai; mereka tidak boleh digambarkan dalam berbagai cara yang akan membangkitkan empati bagi mereka. Sekarang, kapanpun orang Indonesia berpikir tentang "PKI", benak mereka akan dipenuhi cerita-cerita horor, fiksi ilmiah, dan hal-hal gaib. Hampir setiap buku tentang PKI yang terbit, bahkan dari mereka di kalangan kiri, akan punya tetesan darah yang jatuh dari huruf PKI dan angka 1965 dalam covernya.

Studi akademis tentang PKI tidak membantu banyak dalam membawa cerita mereka kembali ke tingkatan cerita manusia biasa. Fokus literatur akademis biasanya mengenai kebijakan partai dan karenanya cerita-ceritanya pun biasanya tentang PKI yang mengadopsi kebijakan ini atau itu dan mengambil keputusan ini atau itu. Buku-buku klasik oleh Hindley dan

Mortimer, sebagai contoh, jelas membantu untuk setidaknya mengakui bahwa partai ini adalah partai politik biasa, dengan pemimpin-pemimpinnya yang merancang strategi dengan alasan-alasan rasional.[1] Tetapi buku-buku ini tidak mengenalkan para pembacanya kepada anggota-anggota partainya dan tidak membahas mengapa orang-orang ini mendukung partai. Buku-buku ini bahkan tidak menulis banyak tentang kehidupan personal para pemimpin partainya. Buku-buku ini beroperasi di dalam genre sejarah politik yang melihat PKI di dalam perjuangan untuk mengontrol kekuasaan negara: mereka mencatat perubahan di dalam strategi organisasi partai, hubungan partai dengan Sukarno dan militer, kampanye elektoralnya, dan sebagainya. Genre ini logis, namun, seperti halnya semua genre, memiliki keterbatasannya sendiri.

Tulisan-tulisan Ruth McVey paska 1965 tentang PKI secara krusial sangatlah penting untuk memahami perspektif orang-orang yang menjadi bagian dari partai. Artikel yang menjadi buku saku ini adalah satu dari tiga artikel yang ditulis McVey tentang lingkungan budaya PKI.[2] Ketiga artikelnya membicarakan sejarah PKI sebagai persoalan sejarah sosial dan budaya. Tulisan-tulisan awal McVey tentang PKI masuk dalam genre sejarah politik. Namun di tahun 1970an, ia mulai berpikir lebih luas tentang apa yang bisa disebut sebagai *subjektivitas* para komunis Indonesia. Bagaimana mereka melihat sejarah dan pergerakan saat itu? Apa harapan-harapan mereka tentang masa depan? Bagaimana mereka memahami posisi mereka di dunia? Posisi mereka di alam semesta? Apa cita-cita mereka tentang perilaku etis? McVey menanyakan hal-hal yang sifatnya lebih ke pertanyaan-pertanyaan level *meta* (yang merujuk ke PKI sendiri). Alih-alih hanya

1 Buku Donald Hindley menganalisa pertumbuhan partai PKI di tahun 1950an: *The Communist Party of Indonesia 1951-1963* (Berkeley: University of California Press, 1966). Buku Rex Mortimer berfokus pada masa Demokrasi Terpimpin: *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1974).

2 Dua artikel lainnya adalah: "The Enchantment of the Revolution: History and Action in an Indonesian Communist Text," dalam *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, A. Reid dan D. Marr, eds. (Kuala Lumpur: Asian Studies Association of Australia, 1979); "The Wayang Controversy in Indonesian Communism," dalam M. Hobart and R. H. Taylor, eds., *Context, Meaning and Power in Southeast Asia* (Ithaca: Cornell University Southeast Asian Program Publications, 1986).

menggambarkan teorisasi mereka tentang Marxis-Leninis (seperti analisa mereka tentang Indonesia sebagai semi feodal dan semi kolonial), McVey bertanya apa signifikansi teori itu untuk mereka.

Buku saku ini membahas PKI sebagai organisasi pendidikan. Ini adalah sebuah hal yang hilang dalam literatur bergenre sejarah politik. PKI, dalam mengorganisasikan partainya kembali sebagai sebuah organisasi yang masih hidup dan legal di awal 1950an, menyelenggarakan banyak macam kelas untuk banyak orang yang berbeda, dari kelas dasar baca tulis untuk penduduk desa miskin sampai kelas teori Marxis-Leninis untuk para pemimpin teratas partai. Partai ini tidak sekedar politik partai yang bertarung dalam pemilu: ia adalah semacam organisasi komunitas serba guna yang membantu anggota-anggotanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan adalah satu dari sekian banyak perhatian utama masyarakat miskin yang diorganisir PKI sehingga partai ini pun melakukan yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah ini.

Saat Belanda menarik pasukannya di tahun 1949 dan negara Indonesia merdeka, semua nasionalis, tanpa memandang ideologi politik mereka, percaya bahwa pendidikan adalah satu prioritas tertinggi. Satu alasan mengapa mereka berperang dan berkorban demi kemerdekaan adalah supaya mereka bisa memiliki pemerintah yang bakal menaikkan tingkatan pendidikan seluruh populasi masyarakat. Mereka tahu bahwa negara penjajah tak akan pernah mengalokasikan cukup dana untuk mewujudkan ini. Dan mereka paham bahwa hal ini membutuhkan usaha besar-besaran mengingat hampir seluruh penduduk Indonesia buta huruf. Belanda bahkan tidak mengumpulkan laporan statistik tentang tingkat kebutahurufan ini.

Ketika mewawancara para bekas anggota PKI dan bermacam organisasi massa-nya di tahun 2000-2003, saya memperhatikan bahwa beberapa dari mereka bergabung ke partai karena merasa berhutang pada organisasi yang memberikan mereka pendidikan. Melalui partai, mereka belajar membaca dan menulis atau belajar untuk memahami politik nasional dan internasional. Masyarakat yang tinggal di desa-desa kecil dan kampung-kampung miskin, yang merasa seperti katak dalam tempurung, bisa merasakan bagaimana mereka adalah bagian dari gerakan di seluruh dunia untuk mencapai cita-cita pembebasan manusia di dunia.

Para pemimpin PKI, seperti banyak nasionalis lain di tahun 1950an, membayangkan Indonesia menjadi - seiring dengan waktu, dengan pendidikan yang lebih baik - sebuah negara maju di mana orang-orangnya sehat dan pandai, dengan hidup lebih nyaman. Akan ada lebih banyak dokter, suster, ahli kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. Banyak orang Indonesia akan memahami ilmu pengetahuan dan tidak akan bersandar pada takhayul untuk menyembuhkan penyakit. Banyak sekali hal yang dipelajari di semua area ilmu pengetahuan, dari fisika nuklir yang mempelajari atom hingga astronomi yang mempelajari alam semesta.

Tidak seperti nasionalis lainnya, PKI menyediakan banyak sekali uang dan waktu kerja untuk menerbitkan dokumen-dokumen dan mengedarkannya. Tak ada partai yang menerbitkan sebanyak PKI – di masa di mana kertas dan tinta adalah komoditas yang jarang dan membutuhkan cukup banyak uang dan pengaruh pada pejabat-pejabat pemerintahan untuk memperolehnya. Bahkan di hadapan sensor rutin, larangan, dan intimidasi dari tentara, jurnalis dan pencetak di PKI terus melakukan kerja mereka dan terus terbit. Di samping koran harian mereka, *Harian Rakyat*, partai menerbitkan secara tetap pamflet-pamflet dan buku-buku.[3] Banyak dari terbitan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan partai. Tiap organisasi massa, seperti Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri), mengeluarkan publikasi mereka sendiri.

Para anggota PKI punya komitmen pada visi hidup modern, apa yang McVey sebut sebagai “modernitas.” Ini adalah sebuah pandangan universal yang sama-sama dianut baik oleh komunis maupun kapitalis dunia: tujuan negara dari setiap bangsa adalah untuk mengatur kesejahteraan material yang lebih besar. Apakah memakai modal swasta, perencanaan negara, atau sebagian kombinasi darinya, setiap negara berusaha memproduksi lebih banyak listrik, membangun lebih banyak jalan, memperluas lebih banyak jaringan telepon, dan menyiarkan sinyal TV dan radio melalui udara. Lebih banyak baja, lebih banyak beton. Semua orang berkomitmen untuk “kemajuan” dan “perkembangan ekonomi.”

Dalam bidang pendidikan, negara Indonesia sanggup mencapai banyak

3 Sebuah koleksi mikrofilm dari dokumen-dokumen PKI yang dijual oleh penerbit Brill (di Netherlands) sejak1952-1965 memiliki 332 judul.

hal di tahun 1950an terlepas dari segala gejolak politik yang terjadi. Jumlah sekolah, murid dan guru secara cepat bertumbuh dalam satu dekade. Negara membayar anak-anak muda untuk mengikuti Sekolah Guru untuk jadi guru. Hanya dalam lima tahun pertama, dari 1950 – 1955, angka guru-guru baru yang dilatih di Sekolah Guru bertambah sampai sekitar 70 persen.[4] Guru-guru baru ini dikirim ke sekolah-sekolah dasar yang dibangun di desa-desa yang tak punya sekolah sebelumnya.

Tetap saja, tuntutan pendidikan jauh melampaui apa yang negara sanggup sediakan. Sehingga PKI dan organisasi-organisasi massanya, seperti banyak organisasi sosial lainnya di Indonesia pada masa itu, ambil bagian untuk mengisi kesenjangan yang ada. Sebagai contoh, setiap cabang Gerwani membuka Taman Kanak-Kanak yang disebut TK Melati. Para perempuan Gerwani juga bekerja sukarela untuk kampanye melek aksara yang diorganisir negara yang mengirimkan para perempuan kota terdidik ini ke desa-desa untuk mengajar di kelas-kelas dasar baca tulis untuk anak-anak dan orang dewasa. Banyak kantor PKI diubah menjadi ruang-ruang kelas di sore hari untuk pendidikan bagi orang dewasa, sebuah program yang partai sebut di tahun 1958 sebagai Universitas Rakyat.

Pemimpin PKI yang bertanggung jawab atas program-program pendidikan adalah Siswoyo, yang diwawancara McVey ketika ia berkunjung ke Indonesia di awal hingga pertengahan tahun 1965. Siswoyo telah meninggalkan sebuah memoar yang bernilai dan mengungkap banyak hal, yang baru saja diterbitkan tahun kemarin. Di dalamnya, ia menyebutkan bahwa partai membuat pendidikan sebagai sebuah prioritas, sehingga terbentuklah sebuah bagian di dalam partai yang disebut Departemen Pendidikan Ilmu dan Kebudayaan pada 1958, yang berbeda dari Departemen Pendidikan Partai. Yang terakhir dijalankan oleh kelompok Agitprop partai dan hanya didisain untuk menjamin semua anggota memahami program partai dan beberapa prinsip dasar Marxism-Leninism. Fungsi departemen yang pertama adalah untuk menyediakan pendidikan umum. Siswoyo menjelaskan bahwa ide saat itu adalah bahwa "kebangkitan rakyat harus diimbangi dengan rasio." Partai harus menyediakan sebuah "pendidikan umum untuk meningkatkan rasio di kalangan massa rakyat, agar massa rakyat dapat

4 Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2007), bab 5.

berpikir lebih matang, jernih, dan objektif." Slogan saat itu adalah "Merah dan Ahli."[5]

PKI juga memainkan peran dalam perluasan sistem pendidikan negara. Beberapa dari guru yang baru dilatih, dari latar belakang miskin, dari orang-orang tua buta huruf, tertarik pada PKI. Merekalah yang bersedia untuk hidup di desa-desa terpencil mengajar anak-anak bertelanjang kaki di gubuk-gubuk tanpa peralatan apapun. Di masa Demokrasi Terpimpin, para guru yang tertarik pada PKI dan Sukarno membentuk sebuah persatuan di dalam perserikatan guru-guru, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Tak puas pada posisi politik para pemimpin perserikatan, yang mencoba mengafiliasi serikat mereka dengan perserikatan konfederasi yang disponsori tentara dan sayap kanan, SOKSI, mereka membentuk faksi terpisah – PGRI Nonfak-sentral – pada Juni 1964. Sebagaimana yang telah sering dicatat dalam literatur atas pembunuhan massal tahun 1965-66, banyak korban adalah guru-guru sekolah: tentara mengumpulkan semua anggota PGRI Nonfak-sentral yang bisa mereka temukan dan membunuh banyak sekali guru hingga sekolah-sekolah kemudian kekurangan guru selama bertahun-tahun.[6]

Genosida politik tahun1965-66 juga telah menghabisi banyak pelajar yang menjadi bagian dari organisasi-organisasi pelajar yang terafiliasi dengan PKI: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) and Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Semua anggota dari sebuah organisasi para dosen dan intelektual dengan gelar sarjana, Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), juga diburu.

Tentang Penulis

Tulisan-tulisan Ruth McVey adalah tulisan tak biasa dalam pendekatan humanistiknya kepada PKI. Dia bukanlah pemandu sorak bukan pula pencela PKI. Dia menulis sebagai akademisi asing dengan sikap profesional yang

---

5 Siswoyo, *Siswoyo Dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri: Memoar Anggota Sekretariat CC PKI* (Bandung: Ultimus, 2014), hal. 157-162.

6 Kenneth Orr, "Schooling and Village Politics in Central Java in the Time of Turbulence," dalam *The Indonesian Killings of 1965-66: Studies from Java and Bali* (Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990), hal. 177-194.

objektif. Dia orang Amerika namun tidak mengadopsi perspektif pemerintah Amerika yang memperlakukan PKI seolah mereka musuh, sesuatu yang dipelajari sehingga Amerika Serikat bisa tahu dengan lebih baik bagaimana mengalahkan mereka. Intelektual lainnya selama masa Perang Dingin mengadopsi pendekatan seperti ini dan mengijinkan tulisan-tulisan mereka ditanami kebencian mendalam pada PKI. Contohnya termasuk: imigran Rumania, Guy Pauker, berafiliasi pada RAND Corporation di California; sosiologis Belanda yang dibesarkan di Hindia Belanda, Justus van der Kroef, yang mengajar di Amerika Serikat; dan emigran Ceko, Victor Fic, yang mengajar di Kanada (yang tulisan-tulisannya berkualitas jauh lebih rendah dari dua orang pertama).

Tampaknya bagi McVey, komunisme di Indonesia dengan mudah menyajikan sebuah *puzzle* intelektual yang menarik: ini adalah komunisme di luar Eropa di sebuah masyarakat agraria yang besar dengan banyak tradisi-tradisi pra modern. Ini adalah sebuah kekuatan sosial signifikan yang perlu diketahui oleh siapapun yang tertarik dengan politik dunia. McVey mengunjungi Indonesia di akhir tahun 1950an dan awal 1960an dan bertemu beberapa pemimpin PKI di Jakarta. Baik anti komunis maupun pro komunis membaca karyanya dan menganggapnya bernilai. Dia biasanya menulis untuk jurnal-jurnal akademis dan independen, menghindari jurnal yang jelas-jelas kiri atau kanan. Tetapi salah satu artikelnya, tentang kematian final PKI di akhir tahun 1960an, ditulis untuk jurnal partisan, *Problems of Communism*, dikeluarkan oleh Layanan Informasi Amerika Serikat.[7] Namun, karena dia salah satu penulis Cornell Paper (1966) yang terkenal itu dan tidak ikut bergabung dalam rombongan anti komunis, banyak pejabat Amerika menganggapnya sebagai pro komunis.

Lahir di tahun 1930, McVey tumbuh di Amerika Serikat, di negara bagian Pennsylvania, dan sekolah di sebuah kampus elit swasta, Bryn Mawr, di negara bagian yang sama, lulus di tahun 1952. Spesialisasinya di kesarjanaan pertama adalah ilmu bahasa Rusia, dia kemudian mengambil studi master di Universitas Harvard mempelajari sistem politik Soviet. Dia sudah tertarik dengan komunisme Indonesia ketika menulis tesis masternya pada 1954. Publikasi pertamanya adalah buku singkat berdasarkan tesis masternya, *The Development of the Indonesian Communist Party and*

7 "PKI Fortunes at Low Tide," *Problems of Communism* 20 (1971), hal. 25-36

its Relations with the Soviet Union and the Chinese People's Republic (1954). Untuk akademisi Amerika Serikat saat itu, ini adalah subjek yang tak banyak diketahui. McVey melanjutkan ke Cornell untuk PhDnya karena Cornell adalah satu universitas di Amerika Serikat di mana ada program studi tentang Indonesia. George Kahin saat itu baru saja memulai Proyek Indonesia Modern di Cornell pada 1954 dan membawa masuk beberapa ahli terbaik dari seluruh dunia.

Sebagai mahasiswa pascasarjana, McVey luar biasa produktif. Sebelum menyelesaikan disertasinya pada tahun 1961, dia menerbitkan dua tulisan melalui Proyek Indonesia Modern-nya Kahin, sebuah bibliografi publikasi Soviet tentang Asia Tenggara, dan sebuah koleksi atas dokumen-dokumen primer tentang pemberontakan PKI tahun 1926-27.[8] Disertasinya adalah sebuah catatan sangat detil tentang tahun-tahun awal PKI dari berdirinya di tahun 1920 hingga pemberontakan di 1926-27. Ketika diterbitkan sebagai buku di tahun 1965, bukunya setebal 500 halaman.[9] Buku ini didasari pemahaman komprehensif atas sumber-sumber dari berbagai bahasa. Sebagaimana kawan pascasarjananya di Cornell, Benedict Anderson, McVey memiliki kemampuan luar biasa dalam mempelajari banyak bahasa. Dia bisa berbahasa Rusia dan Belanda sebelum memulai disertasinya dan kemudian mempelajari bahasa Indonesia semasa di Cornell.

Setelah genosida politik tahun 1965-66 melenyapkan gerakan sosial massa yang selama itu telah dia pelajari, McVey tampak bimbang tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Karena tulisan bersamanya di Cornell Paper, dia pun di-persona non grata-kan di Indonesia, seperti Benedict Anderson, yang dideportasi tahun 1972 dan tak pernah diijinkan untuk kembali. Seperti Anderson, McVey memutuskan di tahun 1970an untuk mulai fokus pada negara lain di Asia Tenggara: Thailand. Terlepas dari tiga artikelnya tentang PKI (diterbitkan di antara tahun 1979 dan 1990), dia menulis sangat sedikit tentang sejarah Indonesia. Sebaliknya, dia menu-

8 *The Soviet View of the Indonesian Revolution* (1957) dan *The Calcutta Conference and the Southeast Asia Uprisings* (1958). Dengan Harry Benda, *Communist Uprisings of 1926-27 in Indonesia: Key Documents* (1960).

9 *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca: Cornell University Press, 1965).

lis pembelajaran umum tentang politik Asia Tenggara dan studi sejarah sosial dan ekonomi Thailand. Dia mengambil pensiun dini dari posisinya di School of Oriental and African Studies di London pada 1984 dan sejak itu membagi waktunya antara menjalankan usaha skala kecil pembuatan minyak zaitun di Tuscany, Italia, dan menulis artikel untuk jurnal-jurnal dan buku-buku.***

Mengajarkan Modernitas: PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan

Ruth T. McVey

I. Pendahuluan

PERSIS setelah peristiwa kup 1 Oktober 1965, ketika massa rakyat diizinkan mengekspresikan kemurkaan mereka dengan membakar kantor pusat Partai Komunis Indonesia (PKI), hal pertama yang dilakukan oleh militer adalah merampas seluruh arsip partai dengan sangat hati-hati. Akademisi-akademisi Indonesia kemudian dipanggil untuk menganalisis berbagai dokumen ini, khususnya rekaman-rekaman penelitian tentang kondisi-kondisi desa yang menjadi basis dukungan utama PKI di Jawa. Salah satu sarjana berkata kepada saya tentang keterkejutannya soal tingkat kecanggihan survei-suvei yang dikirim kader-kader perdesaan PKI kepada partai. Penulisnya melaporkan bahwa jelas ada petani-petani dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah dan kontribusi mereka seringkali dituliskan dengan kasar pada secarik kertas, tapi mereka menunjukkan kemampuan analisis yang asli. Bagaimanakah PKI mengelola pengajaran bagi para petani sehingga bisa melakukan ini semua? Dan apa implikasinya bagi masa depan?

Kecanggihan laporan-laporan perdesaan yang rekan saya catat duapuluh lima tahun lalu ialah buah dari kerja-kerja kependidikannya PKI. Pendidikan telah menjadi pusat perhatian utama kegiatan partai selama periode 1951-1965, tapi kebanyakan gambaran ihwal PKI pasca-revolusioner telah mengecilkan arti pentingnya demi hal lain yang lebih secara langsung bertalian dengan segi-segi kekuasaaan dari pergerakannya. Namun bergunalah kiranya mengangkat kembali soal itu karena bisa menolong menjelaskan minat komunisme pada masa itu dan juga karena bisa menempatkan PKI secara lebih jelas di dalam perkembangan kesejarahan dan kulturalnya Indonesia.

Sangat mudah dipahami bahwa secara formal, PKI menganggap pendidikan sebagai sebuah subjek penting. Marxisme, sebagai sebuah gerakan intelektual-intelektual Eropa abad ke-19 yang berusaha membawa massa ke dalam sebuah pemahaman yang spesifik mengenai kondisi mereka, menganggap begitu penting studi teoritis dan "penciptaan kesadaran" kelas pekerja. Namun, salah satu dari dua tujuan ini mendapatkan prioritas yang berbeda di antara satu kelompok Marxis dengan kelompok Marxis lainnya. Beberapa kelompok—misalnya kaum sosialis Belanda di Hindia Belanda yang datang untuk membentuk kaum revisionis ISDP (Partai Sosial Demokratik Indonesia)—lebih tertarik pada yang pertama, yakni untuk mengakumulasikan sebuah pemahaman "ilmiah" sebagaimana biasa berlaku di kalangan para pengambil keputusan sosialis di Eropa. Kelompok lainnya, seperti mereka yang menciptakan ISDV (Asosiasi Sosial Demokratik Indonesia) yang lebih radikal, secara khusus menaruh perhatian untuk mengomunikasikan pesan Marxis kepada massa rakyat yang terjajah, dan untuk alasan ini mereka melestarikan protes-protes yang dilakukan orang-orang Indonesia, yang pada masa itu membentuk kepemimpinan gerakan dan menamakannya kembali sebagai PKI. Meskipun fokus utama partai pada mulanya berada di dalam gerakan buruh, dan ini kemudian menjadi tulang punggung utamanya, pengaruhnya meluas secara cepat melalui sistem sekolah yang disponsori oleh Sarekat Islam, awal mula dari gerakan massa PKI.

"Sekolah-sekolah liar" di luar kendali pemerintahan kolonial, seperti sistem sekolah SI, berkembang pada dasawarsa awal abad itu, karena orang-orang Indonesia telah memahami bahwa memberikan anak-anak mereka pendidikan dengan gaya Barat adalah satu-satunya cara meyakinkan mereka akan masa depan yang lebih baik. Selain itu, kondisi negara membutuhkan sebuah jenis pengetahuan baru yang radikal, yang dapat menggenggam rahasia kesuksesan Barat. Kaum komunis Marxis-Leninis membuat klaim istimewa bahwa mereka dapat menjadi ilmiah, menjelaskan imperialisme dan menawarkan cara-cara praktis untuk melawan, sehingga tidak mengejutkan jika hal itu cenderung menjadi daya tarik khusus bagi para guru muda yang berada dalam sistem Sarekat Islam—lebih banyak lagi semenjak pendiri sekolah-sekolah SI adalah sang komunis karismatik Tan Malaka. Ketika PKI dan Sarekat Islam berpisah karena pandangan-pandangan politiknya yang berbeda, sekolah-sekolah

SI dengan senang hati memilih untuk berada bersama kaum Komunis.

Tapi mungkin yang lebih penting daripada kenyataan ini terkait penyebaran pengertian bahwa komunisme mewakili suatu pengajaran yang efektif—suatu elmu, ilmu yang memungkinkan rakyat mengatasi kondisi keterjajahannya—ialah cara yang melaluinya kategori-kategori Marxis-Leninis diserap sepanjang dua dasawarsa penjajahan terakhir ke dalam pemikiran nasionalis orang-orang Indonesia. Hal ini, yang datang sebagian melalui tradisi-tradisi dan kontak-kontak yang dimulai oleh ISDV/PKI dan sebagian lagi dari kontak yang dibuat oleh orang-orang Indonesia yang belajar di Belanda, mengambil tempat yang besar karena kemampuan nyata Marxisme dalam mendepak klaim imperialis Eropa sebagai pemilik sebenarnya dari modernitas ilmu. Meskipun komunisme itu sendiri dilarang setelah pertengahan tahun 1920an dan hanya ada sedikit kesempatan untuk menyebarkannya melalui pendidikan sekolah, kategori-kategori Marxis menjadi bagian dari diskursus nasionalis secara umum di tingkat elite. Beberapa dari gagasan-gagasan ini sampai hingga ke rakyat biasa; selain itu, tautan-tautan Marxis tetap dipertahankan hidup secara informal di dalam kelompok-kelompok rakyat biasa yang telah diidentifikasikan dengan PKI pada masa awal-awal masa kejayaan. Pengetahuan yang bersifat spiritual disalurkan di antara para kerabat dan tetangga melalui suatu sistem tradisional seperti sistem *guru-murid*. Melalui cara ini, pandangan-pandangan yang begitu personalistik dan spekulatif mengenai komunisme disampaikan oleh orang-orang yang menggantungkan sumber otoritas mereka pada ancangan moral daripada pengetahuan Marxis yang nyata lainnya. Meskipun terdapat beberapa kontak di antara kelompok-kelompok dan terkadang bahkan dari luar negeri, namun hanya terdapat sedikit upaya dari mereka yang bergerak di bawah tanah yang terorganisir. Sebaliknya, sebagaimana kelompok-kelompok yang lebih tradisional yang mencari pembaruan spiritual, mereka berkonsentrasi untuk merawat dunia mereka sendiri dari diskursus "mengumpulkan kekuatan" untuk melawan pada hari ketika kebebasan datang.[1]

1 Salah satu kelompok itu didirikan oleh pengacara dan pemimpin buruh Mohammad Yusuf pada dasawarsa 1930an; D.N. Aidit, ketua PKI pada periode pasca revolusi, adalah salah satu dari pakar/ahli yang termuda. Pada masa-masa awal pendudukan Jepang, Yusuf membentuk "Gerakan Joyoboyo", membayangkannya dalam hubungannnya de-

Anak-anak dari generasi radikal Indonesia sebelum revolusi menampuk kekuasaan pada tahun 1951 atas PKI yang sekarang legal namun sedang terpuruk.[2] Keadaan-keadaan yang di situ mereka bertumbuh telah mengajarkan mereka bahwa tidak terdapat kontradiksi antara komunisme dengan kesadaran nasional Indonesia itu sendiri. Memang, mereka percaya bahwa hanya dengan mengikuti prinsip-prinsip Marxis-Leninis, Indonesia akan benar-benar memerdekakan dirinya sendiri dari pengaruh imperialisme dan mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa PKI tidak dikelola untuk menyadarkan masyarakat Indonesia selama perang kemerdekaan (1945-1949), mereka memberantas kebusukan-kebusukan para pemimpin gerakan Kiri masa itu, yang kebanyakan dari mereka menghabiskan hidupnya dalam tahun-tahun perang di Eropa dan Australia. Pada saat kepulangan kembali ke Indonesia, para pimpinan ini bersandar pada pemikiran internasional dan tidak percaya bahwa rakyat Indonesia mau mengikuti partai komunis yang bertindak sesuai alurnya sendiri. Menurut anggapan golongan muda, kegagalan para pemimpin Kiri lama dalam menghadirkan komunisme sebagai fokus pokok revolusi Indonesia telah melemahkan kekuatan kaum Kiri dan menghantar pada kompromi-kompromi yang membuka peluang asumsi kekuasaan kaum

---

ngan sebuah ramalan Jawa kuno, akuisisi cepat dari kemerdekaan setelah diperintah oleh yellow men. Pada Oktober 1945, Yusuf mendirikan kembali PKI di bawah kepemimpinannya sendiri, tidak ada lagi yang mendeklarasikan sebuah partai komunis resmi di Republik ini. Kelompok-kelompok berorientasi PKI kemudian mendeklarasikan dirinya juga agar diketahui oleh kantor pusat, menulis atau mengirim utusan untuk menginformasikan keberadaan mereka dan mengklaim untuk membentuk unit partai lokal. Yusuf mengarahkan secara pontang-panting tapi persatuan yang antusisas baru terjadi setelah ia ditangkap dan sekembalinya dari pengasingan dan keberadaan para pemimpin komunis yang lebih konvensional di awal tahun 1946.

2 Dari para pemimpin utama PKI, D.N .Aidit memiliki seorang ayah yang memiliki kecenderungan nasionalis radikal tapi bekerja sebagai seorang pegawai kehutanan, tidak bergabung dengan partai selama periode kolonial; setelah revolusi Aidit mewakili PKI di parlemen. Sebagai seorang pelajar sekolah menengah ekonomi di Batavia, Aidit kemudian terpengaruh Mohammad Yusuf (lihat catatan kaki 1), yang mengajarkannya Marxisme; dia juga tinggal di rumah Yusuf ketika Yusuf ditangkap oleh Jepang. M.H. Lukman tumbuh di dalam kamp konsentrasi di Boven Digul, dimana ayahnya, seorang kyai radikal dari Tegal, diasingkan ke sana menyusul pemberontakan anti kolonial yang dipimpin oleh PKI pada tahun 1926. Nyoto tumbuh besar di Besuki, dimana ayahnya, seorang pedagang dan pekerja partai, ikut mengungsi pasca kehancuran aktivitas Komunis di Surakarta pada tahun 1923. Aidit, Lukman, Nyoto, diwawancarai pada Oktober 1964-Maret 1965.

Kanan dan seringkali pada perseteruan yang membawa petaka dengan pemerintah Republik.

Semua ini telah menyungkurkan PKI menjadi suatu sekte kecil tak berpengaruh pada akhir perjuangan kemerdekaan; tapi dalam pikiran pimpinan partai generasi baru hal tersebut bukanlah akhir dari pertaruhannya komunisme untuk memikul komando atas revolusi nasional. Mereka merasa bahwa perpindahan kedaulatan hanyalah sebuah tahap dalam proses revolusi, yakni meninggalkan Indonesia merdeka hanya dalam nama—hanya sebuah negara "semi-kolonial". Pada saat bersamaan, mereka percaya kemenangan kaum Kanan di dalam republik revolusioner tidak menempatkan negara baru secara tegas di tangan-tangan reaksioner, sehingga memaksa kaum Komunis mengerangkai upaya mereka dalam konteks perjuangan kelas. Sebagaimana yang mereka lihat, batasan-batasan sosial di antara orang-orang Indonesia masih lumayan cair dan borjuis yang baru saja mendominasi masihlah lemah dan terpecah belah, oleh karenanya sebuah jalan balik dari perjuangan nasional menuju perjuangan kelas tidaklah pantas. Malahan, tugas mereka adalah meyakinkan massa rakyat Indonesia bahwa Marxisme-Leninisme memiliki jawaban atas kebingungan yang dihadapi di masa pasca-revolusi, bahwa komunisme adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk para pekerja, dan bahwa hal itu akan membuat mereka benar-benar merdeka.

II. Pendidikan Untuk Semua

Untuk mewujudkan program seperti itu dibutuhkan kemampuan menjangkau massa rakyat dengan mudah, dalam cakupan yang luas dan secara legal. Lebih jauh, bukanlah hal sederhana menyebarkan kata-kata yang baik:[3] rakyat harus dibawa untuk melihat dalam cara yang lebih konkret bagaimana Marxisme-Leninisme dapat membuat mereka mengendalikan lingkungannya, dan bagaimanapun, kemudian, itulah jawaban atas keadaan sulit yang tengah dihadapi bangsa. Kunci hal ini—esensi komunisme, sejauh yang diperhatikan generasi baru para pemimpin PKI ini—adalah organisasi modern, dan tugas prinsipil partai adalah untuk mengajarkan rakyat Indonesia berpikir dan mengatur tindakan mereka dalam sebuah cara Marxis-Leninis yang modern dan terorganisir.[4]

Artinya rakyat harus diajarkan untuk terorganisir, tidak hanya agar melakukan sesuatu dengan lebih baik, tapi juga untuk menjadi sesuatu yang secara kualitatif berbeda dari mereka sebelumnya. Dan perbedaan ini harus dibuat kasat mata sehingga yang lain bisa melihat dan mempelajari.

---

3 Meskipun terkadang disusun seperti ini: para anggota yang direkrut dalam pertemuan-pertemuan relijius, khususnya ketika PKI membuka area baru. Lihat deskripsi dari sebuah pertemuan di Lubuh Pakem, dimana 53 "orang-orang yang jujur" mengisi aplikasi di tempat dan yang lainnya berjanji akan melakukannya dengan segera (*Harian Rakjat*, November 21, 1952). Proses dari calon anggota menjadi anggota penuh dalam partai sebagai sebuah kesepakatan baik bukan hal gampang., melalui pengamatan elaboratif dan proses indoktrinasi sebagaimana tercantum dalam buletin PKI *Kehidupan Partai* tahun 1958 (lihat Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963* [Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1964], pp. 86-87) merupakan hal ideal ketimbang kenyataannya.

4 Saya telah mendiskusikan pentingnya ide dari organisasi untuk PKI dalam sebuah esai yang akan terbit "*Nationalism, Revolution, and Organization in Indonesian Communism.*" Esai-esai ini membentuk bagian dari sebuah kelompok dari empat studi mengenai ideologi dan budaya dalam periode PKI pascarevolusi; untuk mereka yang tertarik dalam mengejar argumen yang lainnya ada di "The Enchantment of the Revolution: History and Action in an Indonesian Communist Text," dalam *Perspections of the Past in Southeast Asia*, ed. Anthony Reed dan David Marr (Singapore: Heinemann Educational Books [Asia], 19790; dan "The Wayang Controversy in Indonesian Communism,' dalam *Context, Meaning, and Power in Southeast Asia*, ed. Mark Hobert dan Robert Taylor (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1986).

Penampilan teater politik seperti itu, yang menemukan ungkapan utuhnya di bawah Demokrasi Terpimpin, sedari awal merupakan sebuah bagian integral dari upaya komunis dalam membangkitkan kesadaran. Ini bukan hanya sebuah persoalan dalam menyajikan pertunjukan: hal-ihwal yang kelihatan seperti ini sebagai jaminan bahwa modernitas dan kekuasaan dalam genggaman, bahwa sarana-sarana tersedia untuk mengubah ketidakteraturan dan ketidakpastian menjadi keamanan dan kepercayaan diri. Visi seperti itulah yang ditampilkan dalam pawai *May Day* di Jakarta pada tahun 1953:

> Hal paling menonjol adalah barisan PKI, mungkin yang paling teratur dibanding semuanya. Dalam rapat umum, mereka membawa simbol partai mereka, palu dan alit raksasa, sebuah spanduk bertuliskan huruf yang besar-besar *Partai Komunis Indonesia*. Semua mata tertuju pada mereka. Mereka mengenakan baju seragam, semuanya putih, ada satu bagian untuk perempuan dan satu lagi untuk laki-laki; hampir setiap orang membawa bendera partai dan sebuah bendera merah. Semua orang dapat melihat kedisiplinan mereka: langkah mereka teratur seolah-olah mereka adalah tentara yang mengerti apa itu keteraturan. Seorang pemimpin berjalan di sisi barisan. Para anggotanya tidak mengobrol, tidak seperti kelompok-kelompok lainnya. Mereka adalah sebuah model, keseluruhan rombongan adalah contoh dari awal hingga akhir, tidak seperti kelompok-kelompok lainnya, yang mengeluarkan anggotanya yang kelelahan satu per satu.[5]

Untuk alasan ini, hal-hal seperti "kebudayaan dan olahraga" yang ada di dalam materi pendidikan kader bukanlah sebuah relaksasi dari urusan sehari-hari tapi berkenaan dengan latihan dan tim olahraga, massa rakyat menyanyikan lagu-lagu partai, kelompok musik dibuat lengkap (karena mereka dianggap sebagai sebuah bagian yang integral dari ikon modernitas ini) dengan mayoret yang berpakaian sopan.

PKI bukanlah gerakan Indonesia pertama yang menerapkan tampilan keteraturan sebagai sebuah tanda, sebagaimana ditunjukkan Jim Siegel

5 Sastradiredja, "1 Mei di Djakarta," *Warta Sarbupri 4*, ¾ (May 1953): 63-64.

di dalam edisi pertama jurnal ini.[6] PKI juga bukanlah pergerakan orang-orang Indonesia pertama yang memanfaatkan unjuk terang-terangan atas ketertiban sebagai tanda, dan mereka yang pernah melihat barisan tertibnya orang-orang Islam di masjid (saat sembahyang) menunjukkan sedikit ketertarikan pada barisan tertibnya PKI selama pawai. Keduanya merupakan penyataan kultural, pernyataan tegas sebagai yang berbeda dan superior, dari persekutuan dengan Kebenaran.

Untuk mempelajari di mana letak kebenaran dan bagaimana semestinya kita menata kehidupan yang sesuai dengannya, orang modern pergi ke sekolah. Bersama kebutuhan akan sekolah ini persoalan pun segera muncul: apakah pengajaran itu diberikan sesuai dengan keadaan sekitar dan dengan sesedikit mungkin formalitas, ataukah pengajaran itu mestinya diletakkan terpisah seperti diwujudkan orde baru, yang di situ para siswa dibudayakan dan dibuat terkagum sekaligus patuh. Aparat pemerintah dan kepercayaan-kepercayaan yang sudah tegak lama lebih suka yang terakhir ini, sedangkan kepercayaan-kepercayaan baru kadang condong ke yang pertama, baik itu karena menekankan keterjangkauan ataupun karena model pertama hanya membutuhkan lebih sedikit sumberdaya. PKI, dengan penekanannya pada organisasi, modernisasi, dan hirarki, punya minat pada model pertama, tetapi pada saat bersamaan juga kekurangan dana dan dorongan untuk meraih massa rakyat secepat mungkin untuk bertindak tanpa aroma mistiknya sekolah formal. Seperti akan kita lihat, dua pertimbangan ini tidak benar-benar terjembatani: ketika waktu terus berjalan, PKI mendorong lebih lanjut ke kedua arah tersebut, yakni mengembangkan akademi-akademi dan diploma-diploma untuk kader-kader pejuangnya serta membentuk kelas-kelas di bawah pohon untuk kaum miskin perdesaan.

Namun,–dalam tahun-tahun pertama, muncul isu yang langka: partai melakukannya dengan apa yang dimilikinya, yang jumlahnya tidak banyak. Pendidikan telah dimulai di partai sendiri dan di serikat buruh yang kemudian menjadi sumber utama kekuatan partai. Kebanyakan kader PKI dan para pimpinan buruh telah meraih posisi mereka di basis revolusioner yang berasosiasi dengan gerakan kiri lebih luas;

6 James Siegel, “Prayer and Play in Atjeh: a Communism on Two Photographs,” *Indonesia* 1 (April 1966): 1-21.

mereka memiliki sedikit gagasan mengenai organisasi, serta hanya sentimen anti imperialis dan populis yang bertahan pada mereka secara ideologis. Konsekuensinya, salah satu tugas pertama partai adalah untuk menginstruksikan para kadernya untuk berada dalam prinsip dasar Marxisme dan Leninisme. Dengan cara itu mereka berharap bisa membangun sebuah kerangka dari diskursus yang menjamin bahwa para ahli mereka bicara pada gelombang yang sama panjangnya dan juga mendorong rasa turut serta pengikut PKI dalam sebuah komunitas yang berpengetahuan, terpisah dan punya keistimewaan sehingga berkewajiban untuk disiplin dan berkorban demi partai.

Tak perlu dikatakan, instruksi seperti itu ada di tingkat yang paling dasar; di tingkat provinsi hal itu sering dimulai dengan pelajaran membaca, karena banyak kader buta huruf. Tentu saja orang-orang buta huruf ini diterima dengan tangan terbuka sebagai anggota partai dan kepada mereka partai berjanji akan memberikan pelajaran membaca dan menulis, suatu kebijakan yang menyatukan ambisi PKI sebagai organisasi massa pada kenyataan melimpahnya kebutahurufan namun menyulitkannya mendaku pada para kader suatu kepemimpinan perkara-perkara modern. Pada tahun 1957, PKI meluncurkan kampanye Pemberantasan Buta Huruf—PBH, yang ditujukan baik untuk kadernya maupun untuk publik. Program ini menyerukan pembentukan kelompok dengan pimpinan yang bertindak sebagai guru dan menyediakan pendidikan politik bersamaan dengan pendidikan baca tulis. Kata ‘Aidit’ atau *aksi* mengilustrasikan huruf A, sementara T diperkenalkan melalui slogan *tanah untuk kaum tani*.[7] Melampaui tingkat yang belum sempurna ini, semangat yang sama, sebagaimana ditunjukkan jurnal-jurnal nasionalis awal, adalah mempublikasikan daftar kata baru yang melaluinya para pembacanya mengerti dunia modern; dan kemudian mereka menghubungkan ide-ide ini untuk menyediakan, dengan cara sesederhana mungkin, beberapa pemahaman Marxist-Leninis mengenai dunia.[8]

---

7 *Tuntutan Pemberantasan Butahuruf* (Jakarta: Departemen Agiprop CC PKI, 1957). Pamflet ini dan pamflet lainnya, *Obor Revolusi*, dipublikasikan oleh partai sebagai panduan untuk gerakan anti buta huruf. Mengenai penyambutan mereka yang buta huruf ke dalam partai, lihat kutipan pidato M.H. Lukman, *Harian Rakjat*, 21 September, 1954.

8 Contoh-contoh dari beberapa literatur/bahan bacaan yang dipublikasikan oleh

Tetapi ideologi itu sendiri tidak akan mengajarkan rakyat bagaimana caranya agar terorganisir, dan mungkin tidak meyakinkan mereka untuk mempelajari sesuatu secara langsung dalam menguasai masalah yang terjadi. Memang, ketika pada tahun 1952 organisasi yang berafiliasi pada PKI di Jakarta—federasi serikat buruh SOBSI memulai kursus kader pertama mereka dengan sebuah penekanan pada teori, mereka yang menghadiri merasa tidak semangat dan tidak puas. Setahun kemudian, para penerusnya merancang pendidikan agar memberikan kegunaan praktis bagi para aktivis di organisasi-organsasi lokal, dan menambahkan sendiri mata pelajaran organisasi, keuangan, propaganda, administrasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan sosial ekonomi, budaya dan olahraga ke dalam pendidikan mereka.[9] Pengetahuan-pengetahuan seperti mengatur anggaran, menjalankan rapat, menerbitkan publikasi, dll. tidak hanya berguna secara langsung untuk membuat partai dan organisasi-organisasi massa-nya lebih efektif; pengetahuan-pengetahuan itu juga memberikan para kader perasaan bahwa mereka mendapatkan keahlian melalui aksi-aksi dengan metode modern. Faktanya, praktik pembangunan organsisasi secara berkelanjutan yang melampaui instruksi mengenai persoalan-persoalan ideologis, baik karena dibutuhkan oleh sebuah partai yang selalu memperluas (dan terkadang melampaui) kapasitasnya dalam mengontrol ataupun karena para pimpinan PKI percaya bahwa untuk terorganisir berarti berada di dalam suatu karunia kondisi historis.

Pada tahun 1950an, kebanyakan upaya ini dijalankan secara relatif dalam kursus-kursus jangka pendek dan bersifat *ad-hoc,* baik di dalam organisasi-organisasi buruh ataupun di dalam partai itu sendiri. Idealnya adalah memiliki pelajaran-pelajaran dasar untuk menjadi seorang komunis di tingkat lokal, baik karena itu melibatkan sedikit saja gangguan dan biaya dan karena itu memungkinkan penyesuaian dengan syarat-syarat dan kemampuan setempat. Masalahnya, seringkali

Departemen Agitasi dan Propaganda PKI untuk digunakan sebagai sebuah teks dasar dalam sekolah-sekolah partai termasuk *ABC Politik, ABC Revolusi Indonesia, Mengapa Front Nasional, dan Bagaimana Masjarakat Berkembang* (semua diluncurkan pada 1957 atau 1958).

9 *Harian Rakjat*, 16 Oktober, 1953. Kursus terakhir berjalan selama sebulan, di sebuah basis paruh-waktu, dan termasuk 188 kader.

tidak ada seorangpun yang dapat menyediakan bahan pelatihan yang mendasar. Lebih jauh, para petinggi serikat dan partai yang mencapai peran mereka melalui kepemimpinan personal seringkali tidak tertarik dalam menginstruksikan pengikut mereka agar mencari cara alternatif dalam melakukan sesuatu. Para pimpinan PKI baru, di sisi lain, bertekad menjauhkan satuan-satuan mereka dari pemimpin mereka yang seperti itu, karena mereka tidak hanya merupakan sebuah hambatan bagi modernisasi gerakan tapi juga sebuah sumber perlawanan atas kontrol pusat. Konsekuensinya, upaya-upaya awal dalam melatih dan organisasi bergulat dengan pengambilan keputusan secara demokratik dan kolektif dan mencerca "komandisme" serta ketidakyakinan akan kapasitas buruh pada umumnya dalam memahami persoalan teori.[10]

Untuk kursus-kursus yang dilaksanakan di tingkat pusat dan wilayah - yang serius, dalam hal konten dan penjenjangan – seleksi terhadap peserta kursus seharusnya diputuskan secara kolektif oleh kepemimpinan satuan-satuan terkait. Calon harus seorang yang dipercaya dapat menyebarluaskan pengetahuannya kembali ke lingkungan sekitarnya. Dia harus aktif di tingkat lokal dan, dalam kasus buruh, harus ingin belajar, dan harus dapat membaca, menulis dan bicara dalam bahasa Indonesia. Bagi orang baru yang memiliki masalah dalam mengikuti pelajaran dan "akan kebingungan saat mendengarkan istilah seperti perjuangan buruh, akan lebih baik jika mereka sudah pernah menghadiri pendidikan kader tingkat lokal dan beberapa pengalaman dalam diskusi-diskusi ideologi.[11] Dan kemudian, tentu saja, calon untuk kursus pelatihan haruslah diajukan untuk menyokong tingkatan organisasi yang hendak mengundang mereka; cuti mereka mestilah diatur apabila mereka itu bekerja dan tempat kerja baru mesti disediakan apabila dia itu orang

---

10 Lihat contohnya "Pesan DPP Sarbupri dalam Memperingati 6 Tahun Sarbupri," *Warta Sarbupri*, 4, 4 (Maret 1953): 5; M. Chairuddin, "Bekerdja untuk Memperkuat Sarbupri," idi. 4, 16 (Desember 1953): 304, 309; Warsosukarto, "Kedudukan dan Tugas Sarekat Buruh," Ibid. 6, 8 (Agustus 1955): 144. Serikat Buruh Perkebunan adalah pusat awal dari kekuatan buruh PKI pasca-revolusi; lebih terbuka dan bersemangat daripada kebanyakan serikat buruh lainnya, dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan organisasional dengan cukup terbuka dalam publikasi-publikasinya.

11 Hasan Raid, "Beberapa Soal tentang Pendidikan Kader," *ibid.* 4, 9 (Agustus 1953): 168; dan lihat secara umum hlm. 167-174.

organisasi purna waktu. Terakhir, anggota-anggota satuan setempat harus pula mengatur bagaimana menyokong kehidupan keluarganya serta menyediakan dana untuk perjalanannya.

Beberapa jenis akomodasi kolektif juga biasanya disediakan untuk mereka yang mengambil kursus tingkat lanjut, baik karena ini berarti mereka menjalankan instruksi secara lebih rutin maupun karena satu dari tujuan pembelajaran pendidikan kader adalah membentuk jaringan persahabatan organisasional yang menyilangkan batas-batas lokal dan regional. Lamanya kursus berbeda-beda, tapi perjalanan yang tidak mudah serta kekurangan latar belakang dari mereka yang akan dilatih membuat pelatihan kader ini sulit dipraktikkan. Dalam beberapa minggu, seorang komentator serikat mencatat, seseorang berhadapan dengan hal penting pada hari itu; pelatihan serius mengenai apapun membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan.[12]

Meskipun semua menekankan pada promosi berdasarkan peringkat, tidak jarang terjadi bahwa aktivis buruh yang menjanjikan tidak diberikan tanggung jawab yang nyata karena, di mata para profesional partai lokal, hal itu akan melibatkan terlalu banyak waktu untuk mengajari mereka dasar-dasar membaca dan berorganisasi; malahan, kader-kader partai yang berpendidikan memiliki tanggung jawab menjalankan sejumlah organisasi, meskipun ini berarti perhatian mereka membentang dengan sangat tipis. Dan, meskipun menekankan agar kader-kader itu dikirim untuk mengikuti pelatihan di tingkat yang lebih tinggi dan akan dikembalikan pada lingkungan asalnya, mereka sangat sering mengambil kesempatan untuk meraih tempat di kepengurusan pusat. Ini bisa menjadi masalah yang kronis ketika seseorang yang berbakat di organisasi lokal ramai-ramai pindah ke Jakarta. Begitu juga pengajaran yang diberikan para petinggi partai yang sibuk selalu menjadi seperti wahyu bagi mereka. Tetap saja, betapa banyak yang dicapai secara luar biasa dengan mengkomunikasikan cara pikir dan aksi baru kepada sejumlah besar rakyat, dan ini terlepas dari keadaan dasar para petugas pendidikan partai. Federasi buruh SOBSI berusaha merancang sistem sekolah di tingkat pusat dan regional untuk memberikan pelatihan kader secara berkelanjutan. Di situ serikat-serikat juga diminta menyedikan pendidikan dasar dan pengetahuan profesional

12 *Ibid*., hlm. 167.

yang khusus untuk para aktivis mereka.[13] Namun, program ini tidak berhasil akibat kondisi ekonomi dan politik yang memburuk pada periode awal Demokrasi Terpimpin dan kemudian, yang lebih fatal, ialah keputusan partai untuk mengonsentrasikan perhatiannya ke kaum tani.

Sebagian besar upaya pendidikan awal, di serikat buruh maupun di partai, dilakukan melalui penerbitan. Selama dasawarsa 1950an, serikat buruh perkebunan Sarbupri, yang secara khusus aktif dalam hal tersebut, mendukung paguyuban-paguyuban orang-orang Sunda, Jawa, dan orang-orang Indonesia lainnya, dan bahkan beberapa organisasi cabang untuk sementara waktu memiliki organisasi mereka sendiri.[14] Yang luar biasa, mereka begitu menaruh perhatian pada persoalan-persoalan tentang bagaimana cara mengorganisir. Hal-hal yang dianggap tepat di dalam gerakan komunis yang telah terbangun (dan di dalam PKI itu sendiri setelah transisi ke masa Demokrasi Terpimpin) antusiasme untuk menyebarkan pengetahuan tentang teknik dan masalah organisasi.

Penerbitan juga dimanfaatkan untuk menjangkau para pekerja biasa. Meski dalam keadaan tingginya tingkat buta huruf, hal ini mengurangi komunikasi dengan cara langsung apalagi dengan diskusi lisan. Para

---

13 *Dokumentasi Kongres ke-VI Serikat Buruh Kereta Api (SBKA)* (Jakarta: Pimpinan Pusat SBKA, 1957), hlm. 90. Sekolah-sekolah SOBSI menyediakan kursus-kursus mengenai sejarah gerakan buruh, program sosial ekonomi [komunis], mencapai persatuan buruh, dan bagaimana memperkuat SOBSI dan serikat-serikat konstituennya. Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) memutuskan, sejalan dengan program SOBSI, untuk menyediakan kader-kadernya instruksi yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis, administrasi, praktik pekerjaan, dan lain sebagainya. Ahli dalam berbagai bidang ini muncul ketika, di bawah kondisi Demokrasi Terpimpin, kader SOBSI mampu menyediakan manajer negara baik dengan pengetahuan teknis maupun kemampuan untuk mengontrol para buruh yang ada dalam organisasi lain seperti SOKSI.

14 Kepemimpinan Sarbupri Jawa Barat mempublikasikan *Panggeuing* dalam bahasa Sunda; Jawa Tengah mempublikasikan *Kolowarti* dalam bahasa Jawa, dan Jawa Timur *Berdjoeang* dalam bahasa Indonesia. BODSU (*Berita Organisasi Daerah Sumatera Utara*), di Indonesia, adalah versi Sumatera Utara, dan *Pembebasan* dipublikasikan di Sumatera Selatan. Cabang-cabang dengan buletin mereka sendiri termasuk Sukabumi, Banyuwangi, dan Palembang. (*Warta Sarbupri* 6/7, 2 [1956]: 36]. Ini, daripada *Warta Sarbupri* pusat dan *Berita Organisasi Sarbupri*, disirkulasikan di antara tingkat-tingkat organisasi yang lebih rendah. Aktivitas mereka mengalami penurunan seiring dengan diambilalihnya perusahaan milik Belanda dan deklarasi Negara Darurat.

aktivis buruh membawa selebaran yang berisi gambaran kondisi lokal lingkungan tempat tinggal rekan-rekan mereka dan memicu diskusi dengan tujuan menyebarkan militansi dan kepentingan organisasi. Hasil pengamatan menunjukkan fakta bahwa manajemen di berbagai perusahaan kembali bereaksi dengan tajam melawan pembagian selebaran di tempat kerja dan hal ini menguntungkan para aktivis dalam mempengaruhi para pekerja bahwa menulis memang memiliki kekuatan untuk membuat para bos ketakutan.[15] Namun secara umum, rapat-rapat umum dianggap sebagai cara untuk melibatkan buruh, dan para aktivis didesak merangkul sebanyak mungkin kelompok diskusi tentang persoalan-persoalan lokal yang penting serta memberi perhatian khusus dalam mengajarkan dan mengawasi para buruh yang dipilih sebagai pemimpin dalam kelompok. Tidak mudah memang untuk mendapatkan rakyat biasa yang mau membicarakan pikiran-pikiran mereka; tapi sekali mereka mempraktikkannya dalam soal keseharian mereka sendiri, mereka akan lebih kritis dan memiliki semangat terbuka. Namun, sebagaimana dicatat dalam sebuah artikel, ada juga aktivis serikat buruh yang takut pada hal ini, sebagaimana para bos perusahaan, karena tidak sedikit yang tak suka gagasan bahwa mereka bisa berpikir bagi diri mereka sendiri.[16]

Di dalam partai sendiri, upaya pendidikan dipusatkan di antara kelompok-kelompok lokal dan untuk memberi pemahaman mengenai konstitusi dan program PKI. Ditambah lagi, sejumlah jurnal dan pamflet dipublikasikan dan diedarkan melalui toko-toko buku yang berorientasi sama dengan partai, serta perpustakaan-perpustakaan yang memiliki hubungan dekat dengan komite-komite cabang partai; kelompok-kelompok studi yang diorganisir untuk mendiskusikan hal-hal penting utama yang ada dalam terbitan. Partai juga mengorganisir konferensi dan seminar yang membahas kondisi-kondisi aktual. Sekolah-sekolah partai (SP) disponsori oleh partai dari tingkat pusat dan beberapa wilayah demi meningkatkan kemajuan politik kader mereka. Dimulai pada tahun 1956 dengan rencana tiga tahun untuk meningkatkan tingkat keterorganisiran dan pendidikan, PKI menetapkan target bagi

15 *Warta Sarbupri* 5, 7 (Juli 1954): 126.

16 *Ibid*. 5, 12 (Desember 1954): 238-39.

komite pusat dan komite partai di bawahnya untuk memastikan bahwa mereka memberikan tenaga yang signifikan ke dalam aktivitas-aktivitas infrastruktural yang pokok ini.[17]

Meskipun demikian, sebagai gerakan yang ingin memperluas pemberantasan buta huruf, mereka menghadapi hambatan terbesar yang pernah ada dalam menyampaikan pesan ke seluruh rakyat sekaligus mengubah harapan kaum komunis dari yang samar dan tidak realistis ke dalam sebuah disiplin dan partisipasi yang stabil. Dengan menyebarnya kader-kader partai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuatan lama, masalah kekurangan bacaan kader, yang memungkinkan mereka mendapatkan informasi dengan didoktrin menjadi kian akut. Hal ini akhirnya memunculkan kebutuhan untuk membangkitkan program pendidikan utama, yang utamanya bertujuan pada peningkatan kemelekhurufan dan kemudian menyediakan kemampuan-kemampuan politik. Dengan sistem seperti itu, program ini diharapkan tidak hanya melayani kepentingan PKI tapi membawa pencerahan kepada rakyat secara keseluruhan. Rakyat biasa akan bisa melihat manfaat dari partai; mereka akan mampu membandingkan upaya-upaya PKI dengan sistem pendidikan pemerintah yang gagal, dan dengan keikutsertaannya mereka akan dikenalkan kepada jalan pemikiran komunis dan akhirnya akan ditarik ke dunia intelektual di dalam partai.

---

17 Sebuah diskusi yang bagus dari rencana pendidikan partai periode pertama (1956-1959) dan kedua (1960-1963) dan usaha-usaha lainnya untuk meningkatkan kualitas kader PKI dapat ditemukan dalam Hindley, *The Communist Party*, hlm. 81-101.

III. Universitas Rakyat

Lembaga penting pertama yang dirancang untuk tujuan ini adalah *Universitas Rakjat*, Unra.[18] Inspirasinya berasal dari *volksuniversiteit,* sistem pendidikan bagi orang dewasa yang sukses luar biasa dalam memperluas pengajaran di antara rakyat pekerja di Belanda.[19] Selama periode kolonial, kaum nasionalis telah mengambil ide ini sebagai sebuah cara untuk menyediakan, baik demi kebutuhan melayani para pengikutnya maupun untuk menanamkan semangat di antara orang-orang Indonesia. Para pemimpin PNI terkemuka di Batavia membentuk *Perguruan Rakjat* pada tahun 1928, dengan tujuan menyediakan pelatihan untuk membentuk "seorang individu yang sadar dan berorientasi pada kehidupan komunitas, menjalankan tugas dan teratur; kita ingin meletakkan dasar bagi pembangunan fisik yang harmonis, seorang manusia yang, dengan sebuah kemampuan yang bersemangat untuk berkorban, akan menempatkan dirinya dalam pengabdian untuk tanah air Indonesia".[20] Inspirasi ideologis dan metode mengajar yang diterapkan *Perguruan Rakjat* banyak berasal dari Taman Siswa, gerakan "sekolah liar" paling terkemuka pada masa kolonial, dan Taman Siswa berpengaruh besar terhadap pemikiran PKI mengenai pendidikan. Sejumlah kader partai merupakan lulusan dari Taman Siswa dan mengajar di dalam sistem tersebut sebelum perang.[21]

---

18 Sebagai sebuah sistem, hal ini secara resmi diluncurkan pada akhir tahun 1958 (lihat ibid., hlm. 94-95), tapi di beberapa kota, komite pendanaan dan organisasi aktif selama setahun atau beberapa tahun lebih awal. Untuk pernyataan yang lebih awal dari tujuan-tujuan Unra oleh ketuanya, Siswoyo, lihat *Ilmu Pengetahuan untuk Rakjat Tanah Air dan Kemanusiaan* (Jakarta: Universitas Rakjat, 1959).

19 Siswoyo dan Porkas Daulae, wawancara, Jakarta, February 1965.

20 Dari pernyataan tujuan Pergoeroean Ra'jat yang diberikan di *Mededeelingen der Regeering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang* (juni 1930) (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1930), col. 49. Institusi mengajarkan beberapa pelajaran praktis seperti cara merawat buku dan stenografi, tapi tujuan utamanya adalah untuk melatih rakyat siapa yang akan bertindak sebagai guru di sebuah sistem sekolah mandiri yang didukung oleh kaum Nasionalis. Krisis ekonomi dan represi politik dijaga dari benar-benar menjauhi akar.

21 Bagaimanapun, Siswoyo, yang mengepalai Universitas Rakjat dari awal, ketika mu-

Meskipun membebaskan unit organisasi massa dan partai dari beban untuk menyediakan pendidikan dasar merupakan motif awal pendirian *Universitas Rakjat*, sistem Unra yang dimulai di tingkat lebih tinggi, mensyaratkan penerimaan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini karena *volksuniversiteit* dijadikan model untuk pendidikan lanjutan, bukan pendidikan dasar; lebih penting lagi karena kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan kader secara berkelanjutan menjadi kian mendesak. Para pegiat partai dan organisasi massa sudah tersedia sehingga akan lebih mudah untuk disekolahkan, dan permintaan mereka akan peningkatan keterampilan akhirnya bisa terpenuhi pula. Konsekuensinya, upaya kecil dibuat untuk menarik peserta didik dari masyarakat umum: biaya yang sedikit pun masih terlalu tinggi untuk kelas pekerja Indonesia (unit-unit partai dan organisasi massa biasanya membayarkan kader yang mereka sponsori di sekolah-sekolah), dan kebanyakan dari mereka yang menghadiri adalah pegawai negeri rendahan dan aktivis partai atau organisasi massa. Orientasi ini direfleksikan dalam pilihan politik yang luar biasa di antara lima pelajaran yang ditawarkan di *Universitas Rakjat*, yang pertama-tama memberi pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan doktrinal dari mereka yang menghadirinya.[22]

Kursus-kursus politik terdiri atas Marxisme, sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, hukum konstitusi, geografi, dan sejarah dunia. Begitu pentingnya pelajaran-pelajaran berorientasi Indonesia, merupakan kekhasan dari kecenderungan nasionalis dari PKI masa ini. Kebanyakan dari kandungan kursus mencakup pengkajian dan pendiskusian tulisan-tulisan tentang keindonesiaan oleh Aidit atau pemimpin PKI lainnya, yang lebih lanjut menekankan kepicikan indoktrinasi. Keprihatinan yang luar biasa atas hal-hal yang terjadi di Indonesia tidak hanya merefleksikan kepentingan kepemimpinan PKI, tapi juga orientasi partai; mata pelajaran yang tidak diajarkan dengan

---

danya mengenyam sistem pendidikan reformis Muslim Muhammadiyah dan bukan Nasionalis Jawa Taman Siswa. Lihat Parlaungan, *Hasil Rakjat Memilih Tokoh2 Parlemen* (Jakarta: c.v. Gita: 1956), hlm. 292

22 Hindley, *The Communist Party*, hlm. 94-95. Lima kursus tersebut ialah ilmu politik, bahasa Inggris, jurnalisme, seni, dan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari semua ini, hanya dua yang pertama yang ada di lebih dari dua dari sepuluh kampus Unra.

rujukan spesifik pada kondisi-kondisi Indonesia sedikit mendapat perhatian, sebagaimana yang telah ditemukan PKI dalam upaya awalnya memberikan pelatihan bagi kader.

Pada September 1959, satu tahun setelah Unra resmi didirikan, mereka mendaku bahwa ada sebanyak 2.816 siswa yang mendaftar di 10 kampus di kota-kota besar di Indonesia.[23] Namun, pelajaran-pelajaran yang ada jauh dari memuaskan. Dalam satu hal, kader-kader di seluruh tingkatan menghadirinya dan apa yang akan memuaskan seorang organiser buruh di tingkat provinsi tidak akan cukup menarik seorang pimpinan partai dalam mencari pengetahuan teori yang lebih tinggi. Bagi yang lainnya, pelajaran-pelajaran, yang biasanya diajarkan tiga kali seminggu di akhir sore, membutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikannya, dan sedikit yang memiliki daya tahan untuk melaluinya. Kader-kader yang sibuk seringkali harus melewatkan sesi-sesi kursus, yang berarti kelas itu akan mengalami sedikit kemajuan atau maju dengan lambat. Para guru—yang jumlahnya tidak pernah lebih dari enam atau tujuh orang, bahkan pada sekolah-sekolah yang lebih besar—biasanya adalah petugas partai yang mengambil kuliah di Unra sebagai pekerjaan dari banyaknya pekerjaan lain dalam organisasi mereka. Sekolah-sekolah nyaris tidak punya apa-apa selain bangunan dan peralatan, dan bahan-bahan bacaan sebagian besar terbatas pada bahan kuliah garis besar stensilan dan beraneka terbitan partai yang dipakai sebagai buku ajar.[24] Singkatnya, banyak alasan bagi seorang peserta didik untuk menjadi tidak bersemangat, dan jumlah yang dikeluarkan (*drop out*) dari sekolah meningkat dengan cepat dan mengkhawatirkan. Pada tahun 1961 menjadi jelas bahwa sistem berada dalam masalah serius, dan membutuhkan perubahan radikal jika itu hendak berlanjut. Tahun-tahun berikutnya pun dihabiskan dengan mendiskusikan perubahan

23 *Ibid*., hlm. 94. Sekolah-sekolahnya berlokasi di Jakarta, Kebayoran Baru, Bandung, Surakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Palembang, and Medan.

24 Sekolah-sekolah yang diselenggarakan di dalam bangunan milik PKI atau organisasi massa yang berafiliasi dengannya, atau dalam beberapa kasus disewakan. Beberapa bantuan keuangan dan peralatan diperoleh dari kedutaan-keduataan besar negara-negara sosialis (lihat ibid., hlm. 94), dan bantuan-bantuan kecil dari Kementerian Pendidikan Indonesia untuk beberapa hal, seperti lemari dan meja tulis (Siswoyo dan Porkas, wawancara, February 1965).

yang dibutuhkan, dan pada Juli 1963 sebuah model Unra (Unra Gaja Baru) diumumkan, dengan ketua PKI, Aidit, sendiri sebagai kepalanya.[25]

Versi baru dari Unra lahir pada saat Indonesia memasuki babak terakhir dari Demokrasi Terpimpin, dan dalam inovasinya itu tercermin perhatian-perhatian yang dipusatkan di tahun-tahun tersebut. Di tempat pertama, sekarang ditunjukkan sendiri dengan tepat mengenai tugas untuk mendidik rakyat, khususnya di daerah pedesaan. PKI, yang tampaknya punya kemampuan untuk menggunakan kekuatan serikat buruh yang sangat dibatasi oleh militer yang mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda dan membatasi aksi-aksi mogok, akhirnya memutuskan untuk menekankan kaum tani baik dalam fakta maupun dalam retorika. Ini berarti upaya khusus untuk membuat orang-orang desa sadar secara politik dan tidak hanya bersimpati secara umum mengenai apa yang mereka imajinasikan ihwal untuk apa Partai Komunis berdiri. Salah satu konsekuensinya adalah penekanan baru dalam mengkonfrontasi pembagian kelas di antara kaum tani, yang mengarah pada kampanye reforma agraria yang terlalu dini pada tahun 1964; dan yang lainnya mengarah pada dorongan untuk memperluas program pendidikan partai yang terhubung dengan massa rakyat di pedesaan. Dengan cara ini,

> .. Rakyat buta huruf akan belajar membaca. Mereka yang merasa dirinya rendah akan diangkat dari lumpur yang merendahkan ke dalam pengakuan bahwa kaum buruh adalah mulia dan bahwa rakyat pekerja, termasuk kaum tani, adalah pencipta dunia ini, bahwa apa yang tuan tanah lakukan pada kaum tani tidaklah menguntungkan melainkan eksploitatif dan jahat, bahwa tuan tanah bukanlah seorang yang mulia, bukan orang yang suci, melainkan seorang yang kotor dan jahat, dan bahwa kekuasannya tidaklah kekal tetapi dapat diguncang dan pada akhirnya digulingkan oleh sebuah *front* persatuan kaum tani yang luas dan berani.[26]

---

25 Siswoyo dan Porkas, wawancara, Februari 1965.

26 *Harian Rakjat*, 22 Februari, 1964, dari sebuah kuliah oleh pimpinan BTI Asmu ke seorang kader Unra dan guru kursus.

Pekerjaan paling pokok—dalam membawa kemelekhurufan dan pesan umum kaum komunis ke desa-desa—telah diserahkan kepada organisasi massa Barisan Tani Indonesia (BTI), yang tugas utamanya adalah mengupayakan usaha-usaha pemberantasan buta huruf. Kampanye-kampanyenya dijalankan selama musim panen, ketika semangat dan usaha-usaha kooperatif meningkat. Idenya adalah menyebarkan keterampilan baca tulis secepat mungkin—selama dua bulan para murid harus bisa membaca dan menulis—dengan menerapkan prinsip ”banyak guru, sedikit murid, ruang dan peralatan sederhana, dan pengajaran yang terkonsentrasi.” Untuk membuat kampanye sukses, pelajaran-pelajaran diorganisasikan bagi mereka yang akan bertindak sebagai guru-guru PBH, dan “wilayah percontohan” melek huruf dikembangkan yang akan berfungsi sebagai mercusuar untuk sisanya. Selain itu, front tani lokal disarankan mengorganisasi anak-anak di pedesaan selama musim menanam dan musim panen, untuk mendukung sekolah-sekolah dasar (sekolah dasar sederhana, SDS) yang diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah.[27]

Sekolah-sekolah dasar ini ditujukan untuk memberi pasokan ke dalam sistem Unra yang diperluas, yang bertujuan untuk terus melatih kader “pintar, berani dan berbudaya”; tapi organisasinya sekarang diperluas hingga di luar kota-kota besar.[28] Sekolah-sekolah dasar ini dibagi ke dalam tiga tingkatan: sekolah-sekolah asli, diberi nama baru Mimbar Pengetahuan Rakjat (Mipera), menjadi divisi tertinggi dari sistem baru yang menawarkan pendidikan di tingkat sekolah lanjutan atas (SLA). Di tingkat sekolah menengah pertama didirikan Balai Pengetahuan Rakjat (Bapera) dan pada tingkat dasar ada Panti Pengetahuan Rakjat (Panpera). Yang terakhir dari sistem ini dinyatakan Aidit sebagai inti upaya Unra yang dirancang untuk menciptakan suatu kesadaran-diri

27 Para murid dapat menghadiri sekolah SDS ini tanpa harus mengenakan seragam. Jam kerja mereka diinstruksikan untuk diatur sesuai dengan jadwal kerja murid mereka, sebagai sebuah alasan utama untuk anak-anak, yang dikeluarkan dari sekolah pemerintah butuh membantu orangtua mereka. Mereka mengajarkan dasar-dasar: membaca, menulis, menghitung, dan berikutnya sejarah, geografi, dan ilmu alam. Budaya meninggikan suara diberikan perhatian, khususnya dengan melatih murid untuk membentuk paduan suara guna menyanyikan lagu-lagu revolusioner. *Ibid*.

28 *Harian Rakjat*, 17 Oktober,1963.

dan terorganisasi secara baik di kalangan penduduk perdesaan, dan dia mengerahkan sepenuh tenaga dalam dua tahun berikutnya memburu unit-unit partai yang mengabaikannya.[29]

Unra yang baru sejajar dengan sistem sekolah negara, dan memang kebanyakan mata pelajaran yang diajarkan juga sama: perbedaan asasinya ialah bahwa sekolah Unra yang lebih tinggi memasukkan pelajaran ideologi, meski arti pentingnya kurang ditekankan ketimbang pelajaran ideologi di masa lalu, karena sekarang penekanannya ada pada melatih rakyat menjadi ahli sekaligus komunis.[30] Oleh karena itu, ilmu-

---

29 Lihat contohnya *ibid*., melaporkan sebuah kuliah kepada kader-kader Unra oleh Aidit pada 5 Februari, 1964. Panpera tidak bertentangan dengan Sekolah Dasar Sederhana, sebagaimana—seperti kampus Unra lainnya—ini ditujukan untuk pendidikan orang dewasa. Karena para muridnya berusia dewasa dan seringkali sangat memotivasi kader-kader partai dimana ini mengasumsikan sekolah-sekolah Unra mampu diselesaikan dalam waktu dua tahun pendidikan paruh waktu (idealnya tiga kali seminggu, dalam waktu empat jam dari 40 menit pelajaran, tapi faktanya apapun yang disusun nyaman bagi guru dan para murid) apa yang sekolah dasar negara disampaikan dalam enam tahun penuh (ibid., 17 Oktober, 1963). Faktanya, bagaimanapun, bahwa ini tidak realistis, dan itu menentukan seorang pelajar akan memiliki pengetahuan yang sama dengan kelas tiga sebelum memasuki Panpera. Konsekuensinya, mereka yang buta huruf adalah yang pertama menghadiri BPH atau kursus-kursus persiapan lainnya selama sekitar 10 bulan dalam rangka mencapai pemahaman dasar keaksaraan. Ibid., 30 April, 1965, laporan Konferensi Nasional Unra yang ketiga.

30 Sekolah-sekolah dasar (Panpera) menyediakan kursus-kursus 1). Manipol (contohnya pemahaman PKI mengenai ideologi resmi Demokrasi Terpimpin), 2). Bahasa dan Sastra Indonesia, 3). Aritmatika, 4). Geografi, 5). Ilmu-ilmu Hayati, 6). Sejarah, 7). Ilmu alam, 8). Menyanyi, 9). Menggambar, dan 10). Pengantar Filsafar (contohnya prinsip-prinsip materialisme dialektika historis). Bapera mengajarkan 1). Manipol dan Kewarganegaraan, 2). Bahasa Indonesia, 3). Bahasa Inggris, 4). Sejarah Indonesia dan Dunia, 5). Geografi, 6). Ilmu Hayati dan Kesehatan, 7). Aljabar dan Geometri, 8). Ilmu alam, 9). Perawatan buku dan akuntansi komersial, 10). Filsafat. Unra mencakup 1). Manipol, 2). Ekonomi, 3). Pemerintahan dan Kewarganegaraan, 4). Sejarah Indonesia, 5). Sejarah Dunia, 6). Geografi, 7). Bahasa dan Sastra Indonesia, 8). Bahasa Inggris, 9). Antropologi Budaya, 10). Aljabar, 11). Fisika dan Kimia, 12). Perawatan Buku dan akuntansi komersial, 13). Filsafat. Ini mungkin diimajinasikan bahwa ini merepresentasikan ideal daripada kenyataan aktual. *Harian Rakjat*, 17 Oktober, 1963. Untuk *outline* yang lebih rinci dari Silabus Unra lihat *UNRA Gaja Baru* 2 (Jakarta: Jajasan Universitas-Rakjat, 1964). Ini merupakan bagian dari serial yang ditujukan untuk memandu para pengajar Unra; hanya vol.2 yang dipublikasikan.

ilmu pasti dan pengetahuan umum ditekankan, dan yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengkaruniakan peradaban modern ke dalam jiwa para siswa. Warga negara Indonesia dari masa depan harus menjadi seorang yang baru secara kultural, Ketua Aidit menjelaskan, karena hanya melalui sebuah transformasi peradaban yang mendalam seseorang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan negerinya. Mereka harus bisa melihat dunia melalui lensa MDH (Materialisme Dialektika Historis), yang akan menyelaraskan pandangannya dengan kebenaran. Jadi, tugas Unra adalah membuat Marxisme, ekspresi filosofis dari pendekatan ini, menjadi milik rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia.[31] Singkatnya, pendidikan Unra akan mengalkulturasi para pelajarnya ke dunia yang diajukan oleh PKI, menjadikan mereka lebih loyal dan menjadi peserta yang lebih efektif dalam gerakan. Pengetahuan teknis seperti mekanika dan reparasi radio dapat meningkatkan keberuntungan individual, tapi ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan umumlah yang mengajarkan sudut pandang progresif, yang dapat menciptakan kader-kader revolusioner dengan lebih sedikit kesalahan di dalam pekerjaan mereka di kalangan rakyat.[32]

Kampus-kampus Unra tidak diakui negara (tentu saja, karena Unra hanya berlangsung dua tahun, pelajaran-pelajaran paro-waktu yang

---

31 *Harian Rakjat*, 27 April, 1965, kuliah oleh Aidit kepada konferensi nasional Unra yang ketiga; *Harian Rakjat Minggu*,

Artikel oleh drs. Bismo Wignyoamijoyo, mendiskusikan sebuah kuliah yang diberikan Aidit kepada kader-kader Unra pada 5 April, 1965. Dalam ilustrasinya mengenai jalan dimana Marxisme-Leninisme diambil sebagai prisma melalui mana dunia harus dilihat, para pemimpin Akademi Aliarcham (lihat di bawah) menekankan pendekatan mereka ke dalam riset dengan para ilmuwan sosial Barat seperti saya. Kamu, mereka bilang, mengumpulkan data dan menuliskan kesimpulan berdasarkan pada apa yang kamu amati dari mereka; kita mengumpulkan data dan kemudian mengevaluasi signifikansinya dalam kerangka Marxisme-Leninisme, karena kita mengetahui bahwa ini akan memberikan jawaban-jawaban yang benar (diskusi setelah sebuah kuliah di Akademi Aliarcham, Maret 1965). PKI menolak "ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri" setegas penolakan mereka atas "seni untuk seni" dalam pertarungan di bidang budaya: ilmu pengetahuan harus melayani rakyat dan revolusi (D.N. Aidit, *Pemetjahan Masalah Ekonomi dan Emu Ekonomi Indonesia Dewasa ini* (Jakarta: Pembaruan, 1964), hlm. 25-29.

32 *Harian Rakjat*, 12 Februari,1964, pidato oleh Aidit dalam sebuah kursus pelatihan Unra.

dipunyainya menyulitkan mereka mencapai tingkat-tingkat yang bisa dibandingkan dengan sekolah negara), tapi mereka tidak merasa hal itu perlu dipertentangkan,[33] karena saat itu sistem sekolah negeri ada di dalam sebuah tahap pembusukan. Seperti lembaga-lembaga birokrasi lainnya di bawah Demokrasi Terpimpin, mereka menjadi korban dari keterpurukan ekonomi dan perselisihan politik. Honor guru cukup menyedihkan dengan adanya inflasi, bahkan seringkali tidak dibayarkan selama berbulan-bulan; bangunan-bangunan hancur dan pasokan peralatan pun habis. Banyak sekolah-sekolah dasar di pedesaan tidak berfungsi sama sekali, sehingga para guru mengambil pekerjaan-pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di kota-kota besar, penempatan semakin kaku dan para orang tua harus membayar biaya yang tinggi agar anak-anak mereka bisa masuk sekolah-sekolah negeri yang layak.

Unra gaya baru, yang dirancang untuk menanggapi kegagalan sebelumnya, menawarkan pelayanan yang sangat dibutuhkan dan pada saat bersamaan menunjukkan bahwa komunisme dapat berfungsi ketika birokrasi negara mengalami kegagalan. Ini adalah bagian dari kampanye PKI yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa partai mengetahui bagaimana memecahkan masalah-masalah Indonesia dan oleh karena itu sesuai untuk menjadi sumber pemerintah; dan karena bagi PKI ini merupakan hal yang sangat penting secara politik, maka semua perhatian dan sumber daya partai dipusatkan agar sistem pendidikan baru ini berhasil.

Pada perombakannya di tahun 1963, Unra menerapkan rencana nasional untuk sistemnya dan menyerukan bahwa dalam empat tahun mesti ada pendirian 6.809 sekolah dasar, 1.263 sekolah menengah (biasanya bertempat di kota-kota kabupaten), dan 22 sekolah menengah atas di kota-kota besar. Ini berarti sebuah upaya yang dahsyat untuk mendapatkan orang-orang berkemampuan yang dapat menjalankan sekolah-sekolah dan menemukan dana serta bahan-bahan yang

33 Merujuk pada Siswoyo dan Porkas (wawancara Februari 1965), sajumlah kecil lurah yang sangat konservatif menolak pendanaan Panpera di desa-desa mereka, tapi itu adalah permasalahan yang sangat kecil.

dibutuhkan.[34] Langkah pertama terbukti merupakan tugas yang lebih sulit, karena di kota-kota sekolah pada umumnya diselenggarakan di ruang-ruang partai atau organisasi massa, sementara di desa-desa mereka seringkali bisa menggunakan sekolah lokal setelah menunggu berjam-jam; dan sebuah kebajikan telah dideklarasikan bahwa sekolah hanya membutuhkan peralatan yang sederhana. Jangan menjadi korban perfeksionisme, Aidit menekankan; jika tidak ada gedung, kita dapat sekolah dengan menggunakan rumah biasa, dan jika tidak ada bisa di bawah pohon.[35] Tetap saja, buku ajar (atau setidaknya beberapa jenis ringkasan mimeografi bahan ajar, yang biasanya ada) tidak dapat diselesaikan jika tidak lengkap, khususnya di tingkat lebih tinggi, dan pada tahun 1965 sebuah kampanye diluncurkan dalam rangka mengumpulkan dana untuk penulisan dan penyebaran bahan-bahan sekolah Unra. Di bawah pengawasan Unra pusat, lembaga khusus yang mendanai Unra dibentuk dan terdiri atas kader-kader Unra, perwakilan organisasi-organisasi massa yang revolusioner, dan "pengusaha progresif" sebagai sumber pencarian dana.[36] Penting disebutkan bahwa para wirausahawan progresif—seperti pengusaha Tionghoa—yang diharapkan menyediakan sebagian besar dana.

Jumlah murid banyak, peralatan yang ada jika dibutuhkan dapat saja yang bekas, tapi para guru sangat penting, dan ini merupakan problem utama dalam perluasan sekolah-sekolah Unra.[37] Salah satu bantuan utama adalah meningkatkan simpati terhadap Kiri di antara para guru sekolah, yang tidak puas pada kemiskinan dan marjinalisasi yang mereka alami di bawah Demokrasi Terpimpin, yang terungkap dalam pembelotan guru-guru PGRI untuk membentuk PGRI/NV "yang tidak terafiliasi".[38] Fakta di tingkat desa menunjukkan bahwa kebanyakan guru

---

34 *Harian Rakjat*, 27 Oktober,1963

35 *Ibid*., 27 April,1965, laporan kuliah Aidit kepada konferensi nasional Unra.

36 *Ibid*., 20 June 20,1965, artikel oleh Bismo Wignyoamijoyo.

37 *Ibid*., 30 April,1965, artikel oleh Siswoyo

38 *Ibid*., 8 Juni, 27 Juli, 1964. Kemudian koordinator dari sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah tinggi di Garut mengumumkan bahwa kabupaten kekurangan guru

yang berada dalam sistem Unra merupakan guru sekolah negara yang mengajar di "sekolah-sekolah liar" Unra pada waktu senggang mereka.[39] Sekolah-sekolah di tingkat desa jarang memiliki lebih dari satu guru, dan di kota-kota, bahkan di sekolah-sekolah tingkat lanjut, jarang memiliki lebih dari enam guru, yang diambil dari guru-guru, intelektual lokal dan kader-kader terdidik gerakan. Guru-guru di desa dalam sistem Unra diberikan pembayaran oleh keluarga para murid (sebuah sistem yang seringkali digunakan untuk mendukung guru-guru negara juga, karena gaji mereka sedikit atau bahkan tidak ada). Sementara mereka yang berada di wilayah perkotaan, yang selalu mengajar karena alasan-alasan ideologis dan karir partai, hanya menerima uang transport.[40]

Tidak ada kriteria untuk menjadi seorang guru di sistem Unra, selain beberapa syarat pendidikan dan sikap yang baik. Pelajaran-pelajaran filsafat (seperti Marxisme-Leninisme) hanya diajarkan oleh anggota partai, dan meskipun yang memberikan pengetahuan doktrinal dasar adalah anggota PKI tapi itu tidak menjamin isinya. Mereka masih bergantung pada diskusi dari tulisan-tulisan utama Aidit dan pamflet yang disediakan partai untuk menjelaskan aplikasi dasar dari MDH. Secara umum, guru-guru Unra mengajarkan apa yang mereka bisa; staf pengajar sangat berharga dan buku-buku terlalu sedikit untuk begitu besar energi yang dikeluarkan untuk mencapai keseragaman isi. Lima hari kursus yang singkat *(kursus kilat)* dibuat untuk memberikan guru-guru Unra beberapa pijakan metode,

karena upah dan distribusi beras sangat tidak memungkinkan sehingga banyak yang mengundurkan diri karena mereka tidak bisa lagi bertahan secara ekonomi. Beberapa orang mengambil pekerjaan-pekerjaan lainnya, ketika banyak guru sekolah dasar di pedesaan menjadi petani sepenuhnya tanpa pernah mengundurkan diri secara formal dari komitmen mengajar mereka. Pikiran Rakjat, 18 Desember, 1963. Untuk diskusi yang lebih umum mengenai penurunan pendidikan negara di bawah Demokrasi Terpimpin, lihat R. Murray Thomas, 'The Effects of Indonesian Population Growth on Educational Development, 1940-1968," *Asian Survey* 9, 7 (Juli 1969): 498-504.

39 Siswoyo dan Porkas, wawancara Februari 1965.

40 Siswoyo dan Porkas, wawancara Februari 1965. Bagaimanapun, para murid di sekolah tinggi Unra diharapkan untuk membayar; Rp. 25 biaya registrasi, Rp. 60 biaya penempatan, dan biaya bulanan sebesar Rp. 75 dalam biaya kursus setipe (*Kedaulatan Rakjat*, September 30,1963).

tapi ini tetap bersifat embrio pada tahun 1965.[41]

Kurangnya kendali pusat yang tersirat dalam kebebasan para guru merupakan sebuah hal lainnya dari Unra Model Baru. Ketika diputuskan untuk memulai kampanye perluasan, diakui bahwa pengawasan ketat tingkat nasional seperti sebelumnya harus dibuang dalam rangka mendorong inisiatif-inisiatif lokal.[42] Badan yang memimpin, "Jajasan Unra", didirikan di tingkat nasional dan regional; yang tujuan utamanya adalah mendorong inisiatif baik dari individu maupun organisasi-organisasi Kiri untuk memulai sekolah di wilayahnya. Dan meskipun secara teoritis dapat mengawasi mereka, dalam praktiknya tidak ada pengawasan dari atas atau dari unit partai maupun dari unit organisasi massa lokal.[43] Seringkali sekolah-sekolah Panpera didirikan secara mandiri, berdasarkan inisiatif seorang guru atau kelompok lokal yang menandakan keberadaan sekolah Unra. Partai membuat sebuah kebajikan: slogan-slogan baru itu otonom dan merupakan inisiatif lokal, sekolah-sekolah dibentuk menurut kemampuan dan kebutuhan lokal. Ekspansi ideologi Kiri, dalam hal pendidikan dan aktivitas-aktivitas PKI lainnya di dalam periode akhir dari Demokrasi Terpimpin, berarti sebuah kepercayaan yang lebih besar pada aspek komunisme sebagai sebuah gerakan daripada sebagai sebuah organisasi, dan tekanan yang lebih besar bagi pengenalan oleh komponen-komponen lokal dan regional. Para pimpinan partai ingin mengakui tantangan ini dengan sentralisme demokratis untuk meningkatkan pertumbuhan, di tahap ini, kuantitas lebih dihitung daripada kualitas.

Hingga April 1965, Unra mencatat terdapat 1.531 sekolah Panpera, 463 Bapera, dan 88 Mipera.[44] Ini kemudian diamati bahwa, meskipun jumlah

---

41 Siswoyo dan Porkas, wawancara Februari 1965.

42 *Harian Rakjat*, 17 Oktober,1963.

43 Siswoyo dan Porkas, wawancara Februari 1965.

44 *Harian Rakjat*, 30 April, 1965, artikel oleh Siswoyo. Dari 27 provinsi di Indonesia, 21 diantaranya terdapat Unra dan 6 wilayah—Banten, Nusa Tenggara Barat, Irian Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Riau—masih dalam "tahap persiapan" (Siswoyo dan Porkas, wawancara Februari 1965).

sekolah dasar di desa banyak di bawah batas bagi perluasan sistem sekolah 4 tahun, sekolah-sekolah Mipera, yang berlokasi di kota-kota besar, telah berlipat ganda dari capaian yang dituju. Alasan pokok atas hal ini adalah bahwa kota-kota besar merupakan tempat dana, staf-staf potensial, dan permintaan yang tinggi berada. Sekolah-sekolah Unra yang telah ada lebih dulu tetap dihadiri kader-kader partai dan organisasi massa dalam pencarian kualifikasi lebih tinggi, dan kebutuhan akan sekolah-sekolah ini tetap merupakan yang paling besar di mata para anggota partai, meskipun Aidit menekankan untuk memusatkan diri pada kaum tani. Selain itu, perluasan sistem yang cepat dalam banyak hal mengarahkan pada kebangkrutan yang sama cepatnya, khususnya di tingkat Panpera dan Bapera, yang sekolah-sekolahnya bergantung pada usaha sedikit orang. Terlalu sering para pendukung PKI bekerja dengan cara "berjalan tidur" atau terikat pada formalisme, yang mendirikan sekolah-sekolah karena didesak oleh para pimpinan PKI—mengumpulkan dana, menentukan lokasi, mencari guru-guru, mendaftarkan para murid, tapi tidak pernah benar-benar jelas akan dampaknya bagi komunitas lokal dan hanya bertujuan mendirikan sekolah dan kenapa sekolah itu berhak mendapatkan dukungan mereka secara terus-menerus. Setelah ledakan awal terjadi, para pelajar dihadapkan pada kenyataan bahwa institusi baru tidak akan membawa keajaiban dalam semalam, dan hal itu pun membuat dukungan kian menyusut.[45] Hasilnya ialah "gejala ekor tikus" yang pernah juga melanda Unra pada inkarnasi sebelumnya, yang di situ sekolah-sekolah secara bertahap mengekor saja tanpa menjadi apa-apa.[46] Tapi meskipun dengan kelemahan ini sekolah-sekolah Unra punya dampak karena mereka menanggapi permintaan rakyat akan pendidikan dan apabila guru memiliki bekal ideologis, mereka mengajarkan orang-orang kebanyakan dengan cara pandang atas dunia yang tampaknya menjadikan dunia mereka masuk akal. Upaya-upaya semacam itu membangkitkan ahli analisis ekonomi-politik desa yang sudah kita sebut di awal artikel ini.

Apabila sumber-sumber daya partai dan organisasi massa dimelarkan oleh

45 *Harian Rakjat*, 3 Juli, 1965, laporan oleh Sudisman pada sesi keempat Komite Pusat.

46 Lihat artikel oleh Porkas Daulae dalam *Harian Rakjat Minggu*, 14 February dan 21 Maret, 1965.

kampanye perluasan Unra, mereka tidak dimungkinkan memusatkan diri pada proyek pendidikan sendirian. Alih-alih, telah diputuskan bahwa cara terbaik untuk mengonsolidasikan kemajuan yang diciptakan Unra adalah dengan mendirikan lebih banyak sekolah, khususnya sekolah untuk melatih kaum tani dan kader-kader organisasi pekerja. Karena itulah, rencana 4 tahun diadopsi BTI pada tahun 1963 mencakup juga sebuah seksi terbesar pendidikan, yang membutuhkan pendirian sebuah pusat sekolah koperasi petani yang diberikan bagi sekitar 400 petani yang diarahkan kader-kader BTI di tingkat provinsi. Di bawah itu, di tingkat provinsi, ada sekolah-sekolah regional yang melatih kader di tingkat kabupaten, dan seterusnya hingga ke tingkat kecamatan, yang di situ kursus kilat diorganisir untuk mendidik kader di cabang lokal (ranting) dan para pemimpin kelompok. Tujuannya membuat semua kader dapat membaca, memastikan bahwa masing-masing ranting memiliki sebuah badan yang mumpuni dalam menjalankan kelompok-kelompok BPH anti buta huruf, dan mendirikan sebuah model SDS, utamanya sekolah di masing-masing kabupaten yang akan menjadi contoh lokal dari metode-metode pengajaran yang baik.[47]

Sebuah Institut Pertanian dan Gerakan Tani "Egom" didirikan pada November 1963 di Cisarua, Bogor, yang berperan sebagai institusi pertanian sekaligus berperan dalam penelitian agraria; Institut ini pun membuka sebuah pusat sekolah kader, Sekolah Tani Egom, pada April 1965. Pidato Aidit pada pembukaan institusi ini menarik karena ia menyatakan bahwa perkembangan PKI tercermin dalam kader-kader yang dapat memberikan sumbangsih pada pembentukan citra PKI sebagai sebuah partai yang mampu menyelesaikan masalah-masalah nasional. Sekolah, ia menekankan, bukan hanya membangkitkan semangat revolusioner kaum tani tapi juga meningkatkan produksi pertanian. Kader-kadernya harus bisa memberikan petunjuk praktis dalam hal-ihwal yang berkenaan dengan budidaya padi, palawija, beternak, budidaya ikan, dan sebagainya; dan mereka harus belajar dari

47 Sebagai tambahan, kelompok-kelompok baca dan perpustakaan-perpustakaan telah didirikan di berbagai tingkat organisasi dalam rangka untuk memastikan bahwa para kader tetap menjaga baik kemampuan baca mereka maupun pengetahuan politik mereka. *Harian Rakjat*, 22 Februari, 1964, kuliah oleh pimpinan BTI Asmu dalam sebuah kursus kader Unra.

praktik petani lokal selain mengambil nasihat ilmiah dari luar mereka.[48]

Karena seni tradisional merupakan cara untuk menjangkau massa yang buta huruf dan karena kepemimpinan PKI melihat modernisasi budaya sebagai sesuatu yang esensial dalam proyeknya menciptakan manusia Indonesia yang baru, perhatian juga mereka tujukan pada pengembangan potensi pendidikan seni. Sebuah program umum mengenai hal ini dirumuskan dalam Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner (KSSR) yang didukung partai pada tahun 1964. Sekolah-sekolah khusus dan kursus-kursus harus dirancang, Aidit menekankan, untuk fokus dalam memecahkan masalah yang dihadapi seniman-seniman dan penulis-penulis Kiri dalam peningkatan ideologi-diri. Di sana mereka dapat membuat sebuah kajian mendalam atas program dan kebijakan PKI, meningkatkan pengetahuan mereka mengenai Marxisme-Leninisme, ahli Komunis di bidang etis dan estetis, kajian antroplogi budaya, dan belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia—semua hal yang akan menolong mereka menghasilkan karya yang memiliki identitas nasional dan berkomunikasi pada massa. Lebih lanjut, kursus-kursus itu harus menjadi sekolah-sekolah yang akan meningkatkan kemampuan teknis para seniman—mereka juga harus menjadi komunis yang ahli. Sekolah-sekolah Reog dan Ludruk dapat meningkatkan derajat estetis

---

48 *Ibid*., 6 April, 1965. Sebuah upaya untuk meningkatkan pelatihan kader-kader serikat buruh juga dibuat pada periode ini, meskipun mendapat perhatian yang lebih sedikit daripada usaha di antara para petani. Kongres SOBSI tahun 1964 berjanji akan meningkatkan tingkat kebudayaan dari para anggotanya dan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai Marxisme; jika ditemukan Institut Pendidikan Buruh "Harjono," yang secara esensial dihidupkan kembali. Sekolah Sentral SOBSI yang ada semenjak akhir tahun 1950an. Pada Maret 1965, Institut Harjono mengambilalih satu ruang di kantor pusat SOBSI, tapi hidup dalam harapan untuk memiliki gedung sendiri. Kebanyakan dari mereka yang menghadiri memiliki pekerjaan sebaga pegawai pemerintah; kursus-kursus dijalankan selama dua bulan karena selama itulah waktu yang biasa digunakan para pegawai itu (kursus-kursus Egom untuk kader-kader BTI berlangsung selama empat bulan). Kursus-kursus menekankan sejarah gerakan buruh Indonesia, sejarah gerakan buruh internasional dan Marxisme. Setiap kemampuan teknis yang meningkat ditinggalkan untuk kursus-kursus pelatihan yang dijalankan oleh individu dari serikat-serikat. Meskipun Institut seharusnya mengambil peran dalam membangun sebuah sistem pendidikan kader secara nasional, sebagaimana yang dilakukan oleh BTI, adalah jelas bahwa hal kecil ini akan tiba di masa depan yang lebih dekat. Wawancara, guru Institut Harjono, Maret 1965.

dan ideologis dari seni pertunjukan tradisional, dan pelatihan bagi para penulis, pelukis, dan musisi seharusnya meningkatkan kualitas karya mereka. Semua ini merupakan bagian dari sebuah Gerakan Kebudayaan Baru yang dibuat untuk menciptakan manusa Indonesia modern.[49]
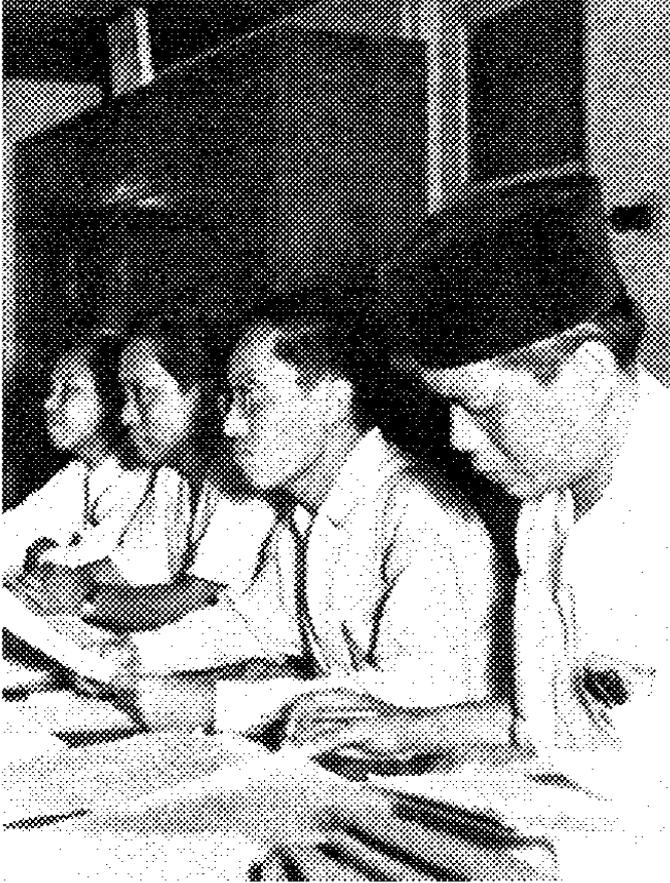
Pimpinan PKI:Lukman, Aidit, Nyoto, Sudisman
Foto koleksi Oey Hay Djoen.

49 *Harian Rakjat Minggu*, 7 Februari, 1965, melaporkan komentar Aidit kepada Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner pada 1 September, 1964; dan lihat *Harian Rakjat*, 22 Juni, 1965, yang melaporkan resolusi-resolusi pada sesi keempat Komite Pusat.

IV. Partai Sebagai Pusat Perjuangan Intelektual

Jika pikiran para pimpinan PKI tertuju pada pendidikan massa tani, hati mereka di tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin tampaknya ada di tepi lain dari spektrum sosial, dengan menaikkan tuntutan mereka di kalangan elite-elite intelektual. Sebagian hal ini merupakan produk dari arus tekanan yang berkembang belakangan pada kemampuan komunisme menyelamatkan Indonesia dari kejatuhan ekonomi lewat organisasi dan keahlian ketimbang melalui konflik sosial yang menyakitkan. Ini juga muncul dari kenyataan bahwa partai memiliki kebutuhan untuk memiliki orang-orang yang mampu mewakilinya secara efektif di dalam institusi-institusi Demokrasi Terpimpin yang meningkat pengakuannya. Hal ini senantiasa menjadi sasaran kekesalan kepada para pimpinan PKI dari generasi Aidit bahwa pergerakan mereka hanya menarik sedikit saja elite intelektual Indonesia. Bahwa mereka angkuh tidaklah mengagetkan, karena pendidikan dengan watak kolonial yang membatasi pendidikan yang lebih tinggi hanya kepada kelas-kelas sosial yang lebih tinggi. Selain itu, dalam periode kemerdekaan pendidikan universitas memberikan jaminan pekerjaan menjadi pegawai pemerintah, dan tidak aneh jika seorang cendekiawan tidak terasing dan terlepas dari birokrasi. Sebagai keseluruhan, birokrasi sungguh-sungguh anti kaum Komunis terlepas dari tekanan-tekanan politik atas soal itu, dan hingga akhir ada kerugian jelas bagi seorang pegawai pemerintah apabila diketahui sebagai anggota PKI.

Guru-guru universitas, yang digolongkan sebagai pegawai pemerintah, secara umum sangat konservatif, dan usaha-usaha PKI untuk mendapatkan anasir progresif yang lebih luas dalam dunia akademik secara umum ditujukan untuk menyerang “mereka yang berorientasi pada Belanda” dan kurangnya dukungan bagi Sukarnoisme, yang secara kuat disenangi komunisme. Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang dipromosikan oleh PKI, cenderung menarik orang-orang yang terpinggirkan dalam dunia akademik Indonesia—dan keanggotaannya sendiri cukup untuk meminggirkan seorang akademisi di mata kolega-koleganya. Meskipun partai membuat banyak upaya untuk membuat orang memiliki pendidikan yang tinggi dan posisi sosial yang bagus untuk mengisi pos-pos di insitusi-institusi yang didukung PKI, jumlah

yang tertarik sangat mengecewakan. Akibatnya, para pimpinan PKI dan sedikit intelektual simpatisan non-PKI melakukan peran ganda dalam kepemimpinan institusi yang didukung partai.[50]

Para mahasiswa, yang berasal dari keluarga-keluarga elite dan dengan jaminan karir di birokrasi, juga tidak tertarik kepada PKI. Selain itu, para idealis di antara mereka tergalaukan oleh korupsi dan kemunafikan Demokrasi Terpimpin, dan mereka mempertimbangkan PKI secara khusus sebagai pihak yang bersalah karena mendukung sistem itu, sehingga (sebagaimana demonstrasi-demonstrasi mahasiswa pasca-kudeta akan menunjukkan) ekspresi kelas dan ide-ide mengenai anti-Kemapanan menyatu dalam pandangan anti-komunisme yang sengit. Hal ini paling kuat terjadi di antara elite Universitas Indonesia, melemah di kampus-kampus lebih bawah dan tak berjejak sama sekali di kampus-kampus provinsi. Perhimpunan mahasiswa yang berorientasi PKI, CGMI, juga cenderung memperoleh dukungan terbesar mereka dari institusi-institusi pendidikan pinggiran.[51] Hanya di tahun terakhir Demokrasi Terpimpin saja CGMI membuat banyak perubahan dalam hal jumlah anggota, dan ini sebagian besar karena penyebaran ke universitas-universitas swasta yang anggotanya tidak terlalu banyak.[52]

---

50 Sebuah contoh yang baik mengenai cara dimana para intelektual muda Kiri direkrut untuk mengisi kepemimpinan sejumlah organisasi massa, dapat ditemukan dalam Ibu Marni, “Saya adalah sebuah daun di dalam badai,” terj. Anton Lucas, *Indonesia* 47 (April 1989): 49-60. Ketika dia mungkin tidak sepasif peserta yang dia ingat, proses dari menggambarkan sebuah janji anggota muda dari elit ke dalam kerja partai, dengan hanya sebuah perhatian kecil bagi disiplin atau kualifikasi ideologi, terlihat cukup akurat. Dia diberikan pelatihan kerja, menjadi kepala dalam berbagai aspek dari kerja organisasi massa dengan level yang terus meningkat, dengan ide yang memampukan dia untuk mengambil kepemimpinan dalam sebuah posisi publik mewakili PKI.

51 Untuk pembangunan CGMI lihat Hindley, *The Communist Party*, hlm. 196-198. Kebanyakan mahasiswa dengan kecenderungan Kiri bergabung ke dalam kelompok nasionalis GMNI, yang menawarkan koneksi yang lebih berguna untuk mendapatkan posisi politik atau birokrasi di kemudian hari. Para mahasiswa yang tidak terhubung dengan rezim cenderung mendukung HMI, yang berjaringan dengan partai Masyumi yang dilarang, terlepas dari apakah mereka memiliki orientasi relijius atau tidak.

52 CGMI mengklaim untuk meluaskan keanggotaaannya dari 30.000 anggota menjadi 40.000 selama tahun 1964 (*Harian Rakjat*, 30 Januari, 1965). Dari semua ini, hanya 3.000 yang ada di Jakarta (*ibid*., 22 Februari, 1965). Terdapat 5.754 anggota di Sumatera

Bisa dimengerti apabila ada keengganan para elite intelektual, karena ada hal yang membuat mereka risih yakni pendakuan PKI atas keunggulan Marxisme-Leninisme. Para pemimpin PKI merasa bahwa kebanyakan dari mereka belajar secara otodidak dalam hal teori dan lebih terhormat daripada kebajikan yang dinyatakan dengan gelar-gelar.[53]

Bagaimanapun, apabila kaum intelektual Indonesia yang mapan tidak tertarik pada komunisme, para pimpinan PKI menyelesaikannya dengan menciptakan para pemikir mereka sendiri, orang-orang yang bahkan akan mengerahkan pengetahuan mereka secara langsung untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang dihadapi negeri. Pada kongres keenam PKI tahun 1959, dihasilkan sebuah resolusi mengenai "Ilmu Pengetahuan untuk Rakyat dan Revolusi", yang ditandai dengan dimulainya sebuah upaya utama meneguhkan partai sebagai pusat perjuangan intelektual.[54] Tidak banyak yang dapat dilakukan karena perhatian PKI dalam tahun-tahun selanjutnya terserap oleh tugas yang lebih sulit, yakni menyesuaikan diri dengan Demokrasi Terpimpin. Meski demikian, pada Desember 1961 sidang pleno ketiga Komite Pusat menekankan isu lebih jauh dengan meluncurkan kampanye untuk

---

Utara dan wilayah Aceh (*ibid*., 9 Januari, 1965). Sebuah pembagian yang baik dari keanggotan Jakarta datang dari Baperki-yang disponsori oleh Universitas Res Publika. Di Solo, lebih dari setengah organisasi mahasiswa membangun Universitas Kotapraja Surakarta (UPKS), yang dimiliki CGMI (Mahkamah Militer Luar Biasa, Berkasno: PTS-021/MMLB-IV/UR/1967 di Surakarta. Perkara Utomo Ramelan Mantan Walikota/K.D.H. Tingkat II Kotamadya Surakarta. Dalam Peristiwa Gerakan 30 September (catatan, di perpustakaan Cornell), 2, hlm. 366.

53 Sebuah contoh yang baik bagi hal ini ialah pertengkaran luar biasa yang dibuat oleh PKI melalui masuknya Aidit sebagai anggota luar negeri pertama dari Akademi Sinica pada tahun 1963. Orang-orang China, yang jelas-jelas menendang hadiah yang akan membuat ia paling senang, diberikan penghargaan di bawah inovasi kreatif Aidit dalam teori Marxis. (Lebih sedikit untuk dikatakan, setelah kup mereka mengumumkan bahwa mereka selalu mengingatkan diirinya bahwa semua strateginya salah dan bahwa perjuangan Maois (petani bersenjata) adalah satu-satunya jalan menuju kekuasaan.

54 "Ilmu untuk Rakjat dan Revolusi," *Bintang Merah* (Nomor Spesial Kongres Nasional ke-VI PKI) 1 (Jakarta: Pembaruan, 1960): 329-330; dan juga hlm. 100-103 dari D.N. Aidit, "Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongroyong," dalam volume yang sama; dan lihat Jusuf Adjitorop, "Kembangkan Terus Pekerjaan Partai dikalangan Intelegensia," *Madju Terus*, 1 (Jakarta: Pembaruan, 1963), hlm. 169-170.

menyebarluaskan pengetahuan teoritis—Ekonomi Politik Marxis (EPM), Materialisme Dialektika Historis (MDH) dan karya-karya Aidit tentang Sejarah Revolusi Indonesia di kalangan kader-kader dan simpatisan komunis terdidik, dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia.

Untuk menjalankan kampanye ini, mereka mulai mendirikan 'akademi-akademi ilmiah' yang berfungsi baik sebagai lembaga-lembaga penelitian/'think tank', maupun sebagai tingkat tersier untuk pendidikan Unra. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan komunis, sangat dimungkinkan seorang yang pada awalnya buta huruf beranjak menjadi sama dengan mereka yang sudah di universitas.[55] Kebanyakan akademi-akademi ini dimulai pada tahun 1962-1964, dan kebanyakan dari mereka masih kecil dan sedikit terorganisir pada 1965.[56] Seperti sekolah-sekolah Unra, mereka dijalankan dengan sistem paro-waktu dan ditujukan untuk orang-orang yang memang memegang pekerjaan

---

55 Institusi-institusi yang penting ialah Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Akademi Ilmu Politik Bachtaruddin, Akademi Ilmu Ekonomi Dr. Ratulangi, Akademi Ilmu Sedjarah Ronggowarsito, Akademi Ilmu Musik W.R. Supratman, Akademi Ilmu Sastra Multatuli, Akademi Ilmu Teknik Ir. Anwari, dan Akademi Ilmu Jurnalistik Dr. Rivai. *Harian Rakjat*, 24 Februari, 1964. Akademi Teknik Dr. Anwari menawarkan kursus-kursus arsitektur, teknik sipil, dan teknik elektro (*ibid*., 1 Oktober, 1964). Akademi selanjutnya yang direncanakan ialah akademi seni dan tari, bersamaan dengan sebuah Universitas Kesenian Rakjat (Banda Harahap, wawancara Maret 1965); seni-seni merupakan subjek batiniah partai yang ditempatkan dengan penekanan besar pada transformasi dari budaya tradisional. Sebagai tambahan, akademi sastra berfungsi sebagai sebuah sekolah bahasa, menawarkan pelajaran bahasa Inggris, bahasa China, dan bahasa Rusia (*Harian Rakjat*, 16 Desember, 1963). Beberapa akademi diperluas di tingkatan regional: maka Akademi seperti Akademi Ilmu Politik Ngurah Rai didirikan sebagai tempat bagi orang-orang Bali yang merupakan turunan dari Akademi Bachtaruddin (*ibid*., 28 September, 1964). Sebagai tambahan, PKI mulai mempromosikan institusi-institusi pelatihan guru, dimana yang paling terkenal ialah IKIP Dr. Tjipto Mangunkusumo di Yogyakarta. Institusi ini menawarkan mata kuliah pedagogi, ilmu-ilmu sosial (dengan kekhususan dalam bidang ekonomi), ilmu alam, dan seni bebas (dengan kekhususan sejarah), dan dia juga menawarkan kursus peningkatan kualitas guru. Harian Rakjat Minggu, 9 Agustus, 1964.

56 Akademi Bachtaruddin, salah satu yang terbesar menerima 88 mahasiswa pada tahun pertama (1962/1963) *Harian Rakjat*, 3 Oktober, 1962). Akademi Sejarah Ronggowarsito memiliki 11 mahasiswa pada tahun 1962/62, dimana 10 lulus ujian akhir, dan menerima 22 mahasiswa pada tahun 1963/1964 (*ibid*., 19 Desember, 1963).

tertentu dalam partai (meski begitu, diharapkan bahwa kedewasaan dan pengabdian lebih besar akan memungkinkan siswa-siswa mereka mencapai kesetaraan pengetahuan tingkat universitas dalam tiga tahun). Sama seperti Unra, mereka berbagi tujuan dalam menyediakan pendidikan umum dan meningkatkan kemampuan kader-kader partai, dan mereka juga ditempatkan untuk terlibat dalam proyek-proyek riset partai atau pembangunan kebijakan dalam bidang yang relevan. Persyaratan masuk mereka cukup ketat (menurut patokan baku masa itu), meski konsesi diberikan kepada kader-kader partai: PKI berkeras bahwa akademi-akademinya tidak akan mencoreng tinta hitam dibanding dengan lembaga-lembaga non-Komunis.[57]

Yang pertama dan paling penting dari institusi-institusi ini adalah Akademi Ilmu Sosial Aliarcham (AISA), yang didirikan pada tahun 1959. AISA didirikan sebagai sekolah tinggi partai, pusat pelatihan kader PKI senior. Inilah, seperti dicatat B.O. Hutapea, untuk pertama kalinya sekolah semacam ini didirikan oleh partai komunis yang tidak memegang tampuk kekuasaan.[58] Setelah menemukan jalannya dengan serangkaian kursus-kursus singkat, yang kebanyakan atas pesanan pelatihan kader yang lebih tua, sekolah ini mulai menawarkan sebuah pendidikan purna waktu selama tiga tahun, yang memfokuskan pada karya Aidit: *Sosialisme di Indonesia*, yang ditulis untuk digunakan

57 Kemudian akademi ilmu politik Bachtaruddin membutuhkan pelengkapan SLA (atau pengalaman yang setara ditambah sebuah ujian lisan, ini hal prinsipil bagi kader partai), ditambah sebuah ujian masuk mengenai sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia dan pengetahuan mengenai Pancasila dan Manipol/USDEK, pengetahuan umum, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Biaya registrasi sebesar Rp. 300, dan biaya kuliah sebesar Rp.3.000 setahun (*Harian Rakjat*, 17 Juli, 1964). Institut Ilmu Ekonomi Dr. Ratulangi menerapkan biaya yang sama dan juga persayaratan yang sama; ujian masuk terdiri atas sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengetahuan mengenai Haluan Negara dan prinsip-prinsip Dekon Demokrasi Terpimpin, dan menunjukkan kemampuan menulis esai-esai dalam bahasa Indonesia (*ibid*., 5 September, 1964).

58 B. O. Hutapea; "Proletariat Indonesia Melahirkan Intelektuil2nja Sendiri," ibid., 20 dan 21 April, 1964. Akademi Aliarcham secara resmi dibuka ke publik, dalam rangka untuk mengkualifikasi subsidi pemerintah; pada praktiknya persyaratan ujian masuk berupa pengalaman yang relevan dan pengetahuan megenai Marxisme-Leninisme mengeliminasi semuanya kecuali kader-kader partai (Sucipto dan Sugiono, wawancara, Jakarta, Maret, 1965).

sebagai teks dalam sistem pendidikan partai yang lebih tinggi. Dari sini berkembang menjadi studi umum mengenai Marxisme-Leninisme dan permasalahan-permasalahan Revolusi Indonesia.[59]

Akademi Aliarcham sebetulnya hanya dapat menampung sebanyak 40 mahasiswa purna waktu, dan ketika kemudian jumlah calon mahasiswa berlipat ganda, seleksi pun dibuat dan jumlah pelamar ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan. Pada kali pertama, 80 persen mahasiswa berasal dari Jawa, tapi semenjak para pimpinan PKI memutuskan untuk meningkatkan kehadiran partai di pulau terluar, sebuah kebijakan mengenai preferensi bagi non-Jawa diputuskan dengan mengurangi porsi pulau hingga 60 persen.[60] Mahasiswa purna waktu diharapkan menghabiskan 6 bulan di akademi dan 6 bulan kemudian melakukan pekerjaan praktis bersama sekolah-sekolah partai atau organisasi massa di provinsi-provinsi; mereka juga ditugaskan untuk penelitian lapangan secara berkelompok dengan membawa pertanyaan, seperti hubungan kelas di desa dan kondisi kehidupan buruh. Selain itu, sebuah kursus tambahan selama 4 tahun dibuat untuk kader yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan organisasinya, dan seminar-seminar serta kelompok-kelompok diskusi didirikan untuk para pemimpin partai yang

---

59 Terdapat lima departemen di akademi: 1). Filsafat, menawarkan pelajaran-pelajaran seperti sejarah filsafat, materialisme dialektis, materialisme historis, filsafat oriental, dan pembangunan filsafat di Indonesia; 2). Ekonomi Politik, dengan pelajaran-pelajaran mengenai sstruktur ekonomi pada masyarakat prakapitalis, ekonomi sosialis dan komunis, Dekon (prinsip-prinsip ekonomi Demokrasi Terpimpin), pembangunan uang dan bank di Indonesia, koperasi, dan prinsip-prinsip ilmu statistik; 3). Sejarah gerakan buruh internasional, dengan pelajaran-pelajaran mengenai sejarah dunia, revolusi-revolusi borjuis, dan gerakan pembebasan nasional (Asia, Afrika, dan Amerika Latin); 4). Masalah-masalah Revolusi Indonesia, dengan pelajaran-pelajaran seperti Manipol dan Pancasila, sejarah umum Indonesia, antropologi budaya, Ilmu Islam, dan gerakan pembebasan nasional Indonesia, masalah-masalah umum dari Revolusi Indonesia, dan Sosialisme Indonesia; dan 5). Bahasa dan Budaya, dengan mata pelajaran yakni bahasa Indonesia, bahasa Rusia, bahasa Inggris dan sejarah kebudayaan Indonesia. *Prospektus "Aliarcham"* (Jakarta: Jajasan Akademi Ilmu Sosial "Aliarcham," 1964), hlm. 6-7. Mata pelajaran/mata kuliah seperti antropologi budaya, Ilmu Islam, dan Filsafat Oriental, merefleksikan baik ahli mengajar yang tersedia maupun sebuah usaha untuk mencegah kader-kader memiliki prasangka "Anti-China dan Anti-Muslim" (Sucipto dan Sugiono, wawancara, Maret 1965); dan lihat Hutapea, "Proletariat Indonesia").

60 B.O. Hutapea, wawancara Maret 1965.

lebih tinggi yang ingin membuat diri mereka terlibat dengan persoalan-persoalan teoritis. Hasil dari tingkat dan pendekatan yang berbeda-beda ini berujung pada keputusan tahun 1964 untuk membuat tiga macam ijazah bagi lulusan Aliarcham: Sarjana Marxis (SM), gelar ini disematkan bagi mereka yang memiliki keutamaan dalam partai dan mereka dipertimbangkan sebagai ahli setelah berpartisipasi dalam beberapa seminar dan proyek spesial; Sarjana Marxis Terbatas (SMT, sarjana dasar Marxis) bagi mereka yang menyelesaikan pendidikan purna waktu; dan Tjalon Sarjana Marxis (TSM, kandidat sarjana Marxis) bagi mereka yang menyelesaikan program ekstensi.[61]

Beberapa mahasiswa universitas yang tergabung dalam CGMI meminta untuk pindah ke Akademi Aliarcham, tapi partai enggan menerima mereka. Alasannya, meskipun PKI membuat sistem pendidikannya sendiri, mereka menempatkan pendukung partai yang memperoleh gelar dari universitas lain dengan lebih tinggi.[62] Dengan intensif, juga, partai menekankan para mahasiswa Kiri untuk menghabiskan waktu mereka dengan buku-buku ketimbang melakukan agitasi; ini untuk menunjukkan bahwa mahasiswa komunis adalah yang terbaik dan tercerdas, dan mampu dalam memimpin dan bertanggung jawab secara sosial.[63] Para pimpinan partai juga menginginkan orang-orang dengan kemampuan baik untuk ahli non-politik: teknisi dan manajer yang cakap, yang termotivasi bukan hanya oleh tantangan dari bidang mereka dan pencapaian material individu tapi oleh komitmen sosial.[64] Para pimpinan partai melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk memancarkan kompetensi manajerial, sebagian karena gaya

61 B.O. Hutapea, “Proletariat Indonesia”; pada April 1964 14 orang menerima gelar SM, 17 orang SMT, dan 6 orang TSM, mengindikasikan angka tingkat *drop out* yang cukup besar.

62 B.O. Hutapea, wawancara Maret 1965.

63 Sikap “Inteketual Borjuis” dan “pembawa jalan damai” ini dikritik oleh kaum Kiri yang diasingkan setelah kup 1965. Lihat contohnya Supeno, pidato 27 Mei, 1967 di Peking, *Suluh Pemuda Indonesia* 1, 13 (Juli 1, 1967): 4-5; Setia Murni, “Pensistematisan Garis Revisionis dibidang Pendidikan,” Suluh Pemuda Indonesia 3, 63 (11 Maret, 1968): 11-13.

64 Contoh yang baik dari perilaku lihat *Harian Rakjat* 20 November, 1964, yang melaporkan sebuah pidato oleh Aidit pada 16 November.

itu menarik mereka, sebagian karena itu adalah basis dari kebutuhan PKI untuk berkuasa melalui penguasaan organisasi, dan terakhir karena ada sebuah dasar untuk penerimaan sebagai bagian dari elite berkuasa. Motif-motif ini terjalin tapi tidak serasi secara keseluruhan: secara khusus hasrat memenangkan penerimaan bertabrakan dengan tuntutan untuk mewakili pendekatan modernitas yang lebih superior daripada yang ditawarkan borjuis Barat. Dalam soal pendidikan tinggi, para pimpinan PKI cenderung tunduk pada Kemapanan; oleh karena itu, dapat dipahami dorongan mereka terhadap para mahasiswa kiri untuk melanjutkan pendidikan di universitas borjuis dan upaya mereka membujuk setiap pemegang gelar dari lembaga non-komunis yang kelihatannya bersimpatik.

Cara utama yang dapat menunjukkan intelektualitas dan kecakapan administratif PKI kepada bangsa, sekaligus meningkatkan efektivitas pekerjaan organisasi massa mereka, ialah dengan mengadakan penelitian sosial sebagai sebuah dasar bagi rekomendasi kebijakan praktis, dan pada 1964 diputuskan untuk menjadikan hal ini sebagai fokus utama dari usaha Akademi Aliarcham. Sekolah tinggi partai ini kemudian berubah secara administratif sebagai Akademi Politik Aliarcham. Sebuah *dewan ilmu* dibentuk, terdiri atas intelektual-intelektual partai terkemuka dan intelektual-intelektual yang bersimpatik, dan wilayah-wilayah penting bagi penelitian diidentifikasi.[65] Proyek-proyek utama disponsori dalam program tahun pertama *dewan ilmu* yang melibatkan tim penelitian ke dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi dan agraria; mereka ditugaskan untuk membingkai setiap pelajaran yang mereka dapatkan sehingga punya arti bagi kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam pertanian, AISA diminta tidak secara spesifik mengenai hubungan kelas (bertentangan dengan penelitian yang dipimpin Aidit—akan dibahas setelah ini), tapi tentang mengapa satu desa dapat mengadaptasi teknik dan tanaman pangan baru sementara desa lain di dekatnya dan dengan lingkungan yang sama tidak. Apa yang menjadi faktor utama dalam

65 Dewan, didirikan pada 8 Maret, 1964, terdiri atas Aidit (Katua Terhormat), Prof. Can Cu-som (Ketua), B.O. Hutapea (wakil-ketua), A. Sucipto, Dr. Suprapto S.H., Coo Tik Cun, F. Runturambi, dra. Carmel Budiarjo, Sugiono, dra. Ina Slamet, Prof. Can Cu-sim, Sunito, Prof. Bakri Siregar, dan Dr. Busonowiwoho Sumotirto. *Harian Rakjat*, 10 Maret, 1964; *Prospectus "Aliarcham,"* hlm. 5.

penerimaan hal itu? Cara terbaik apa yang dapat digunakan untuk mengenalkan metode yang dapat meningkatkan produksi? Proyek ekonomika mencari tahu soal faktor-faktor biaya dalam harga dasar pangan dan sandang di banyak kota besar di Indonesia: jumlah tahapan dan operasi yang terlibat dalam sistem distribusi; harga dan masalah-masalah transportasi; serta sumber-sumber dan jumlah pemborosan.[66] Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dianggap sebagai pertanyaan penting, karena sebenarnya pada saat yang bersamaan tidak terdapat informasi mengenai hal itu. Mereka berhubungan secara kuat dengan setiap usaha administratif untuk menangani permasalahan-permasalahan ekonomi Indonesia; lebih penting lagi mereka mengungkapkan bahwa permasalahan-permasalahan ini dapat diselesaikan oleh pengetahuan dan organisasi. Rakyat Indonesia bukannya tidak berdaya dalam menanti krisis ekonomi, mereka bersikeras: mereka dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan negerinya, menanganinya dengan tindakan modern, yang ilmiah dan kemudian merencanakan suatu tanggapan rasional. Dan, setidaknya, mereka mengisyaratkan bahwa mata air dari pengetahuan yang pas, bahkan untuk hal-hal yang teknis, ialah PKI.

Dewan-dewan keilmuan dan proyek-proyek penelitian menyibukkan PKI di tahun-tahun terakhir. Akademi Aliarcham mendirikan *dewan ilmu* di kota-kota besar lainnya, yang berfungsi, sebagian untuk memperlibatkan intelektual non-partai dan sebagian lagi untuk menjalankan penelitian-penelitian, yang oleh anggota-anggota dewan setempat, dirasakan penting diajukan.[67] Himpunan Sarjana Indonesia mendirikan banyak

66 Can Su-som, wawancara, Jakarta, Februari 1965. Proyek agrikultur melibatkan 80 orang, termasuk sosiolog pedesaan dan spesialis pertanian, dan berlangsung selama 5 bulan. Proyek ekonomi berjalan selama dua bulan dan melibatkan 20 orang; dilangsungkan di Jakarta, Medan, Makassar, dan Semarang. Prof. Can menekankan bahwa proyek-proyek ini tidak ditujukan untuk menyediakan riset yang selesai tapi studi-studi cepat yang dirancang untuk memproduksi panduan-panduan untuk aksi-aksi yang akan segera dilakukan.

67 Wawancara, Can Cu-som Februari 1965; A. Sucipto dan Sugiono Maret 1965. Cabang-cabang Aliarcham ada di Bandung, Semarang, dan Surabaya; sebagai tambahan ada juga kelompok-kelompok yang tidak disebutkan secara resmi di Medan, Makassar, dan Denpasar. Proyek utama riset yang dilakukan di luar wilayah akademi di Jakarta adalah mengenai pendidikan. Dia menambahkan sendiri masalahnya bahwa materi pendidikan

sekali lembaga yang tugas utamanya menyelenggarakan seminar dan konferensi-konferensi.[68] BTI menambah Pusat Egom-nya di Cisarua dengan Lembaga Keilmuan Jagus untuk Pertanian dan Pemilihan Benih di Klaten, Organisasi perempuan Gerwani mendukung Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak untuk mendirikan program prasekolah. Hanya gerakan buruh, anak tiri PKI di periode akhir Demokrasi Terpimpin, yang terlihat kurang kuat membangun kekuatan ilmu pengetahuannya.

Perhatian yang ditujukan untuk memenangkan rasa hormat ini, bersama dengan perluasan yang cepat dari gerakan aparat birokrasi dan kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh posisi perwakilan yang dicapai di bawah Demokrasi Terpimpin, ternyata membangkitkan bahaya "borjuisasi" yang tidak dipertimbangkan, yang di situ anggota partai menjadi bagian dari keberadaan sistem. Untuk mengatasi ini, tekanan diletakkan pada disiplin organisasi, baik dengan memperluas peran badan regulasi di dalam partai, seperti komisi kontrol dan verifikasi, dan memperbaharui penekanan pada pengajaran kader dalam cara mengorganisir. Biro Pendidikan Sentral, yang terlibat dalam mengawasi pelatihan di dalam partai, ingin melihat bahwa para kader mengerti dan melatih prinsip-prinsip "membandingkan, belajar, mengajar, dan mendampingi", yang merupakan dasar bagi kritisisme pribadi dan penegakkan disiplin.[69] Sekretaris Partai Sudisman, ketika melaporkan

---

yang tersedia kebanyakan adalah materi anak dan berfokus pada perkotaan, ketika yang dibutuhkan oleh sistem Unra adalah materi-materi yang melayani kebutuhan orang usia dewasa dan mendorong mereka untuk tetap produktif di wilayah pedesaan ketimbang mencari pekerjaan sebagai pegawai di kota (B.O. Hutapea, wawancara Maret 1965).

68 Ini termasuk Institut Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik dan Hukum, Ilmu Pedagogi dan Psikologi, dan Ilmu Kesehatan dan Kedokteran; ini direncanakan untuk mendirikan sebuah Institut Sejarah, Bahasa, dan Kebudayaan; sebuah Institut Ilmu Agrikultur dan Agraria; dan lain-lain. *Harian Rakjat Minggu*, 14 Maret, 1965.

69 Dalam rangka mencegah kecenderungan cepat berpuas diri, maka dideklarasikan, para kader harus 1) belajar untuk bekerja mencapai tujuan-tujuan dari rencana pembangunan partai; 2). Belajar untuk bekerja dengan baik di berbagai bidang; 3). Belajar untuk bekerja dengan sikap yang rasional, efektif, dan tepat waktu; 4). Belajar mengevaluasi kemampuan diri sendiri dan mengenai lingkungan mereka "merekonsiliasi hasrat-hasrat yang meluap-luap dengan kemampuan yang terbatas," 5). Belajar untuk bekerja dengan tekun, cakap, dan melaporkannya secara periodik; 6). Belajar untuk terorganisir dengan baik.

kemajuan dalam hal ini pada pertengahan tahun 1965,-mencatat bahwa langkah-langkah besar telah dibuat untuk meningkatkan kemajuan disiplin dan pemahaman kader mengenai tujuan-tujuan partai.[70] Kita sebaiknya tidak mengasumsikan terlalu banyak mengenai hal ini, karena masa tersebut juga merupakan masa pengendapan dari peluasan keanggotaan partai dan organisasi massanya, dan apa yang diperoleh dengan meningkatkan disiplin kuat para kader menjadi cair dengan perekrutan anggota-anggota baru tidak terdidik. Tetap saja, usaha serius dibuat untuk menjadikan partai sebagai organisme berkerangka kokoh; dan penekanan pada "kompetisi sosialis" di antara kader-kader individual dan unit-unit partai untuk memenuhi rencana-rencana pembangunan melalui kampanye-kampanye "kecil tapi sukses", tidak diragukan lagi mempengaruhi cara komunis dalam melakukan tindakan yang efektif.

Cara lain yang dengannya para pimpinan PKI mempertahankan jalinannya dengan massa rakyat adalah dengan mempelajari mereka. Sudah lama dipahami para pimpinan partai bahwa mereka tidak cukup pengetahuan tentang pedesaan Indonesia untuk merumuskan strategi kelas dalam soal pertanian, yang di dalamnya mereka bisa punya kepercayaan diri. Atas dasar itu, pada 1959 kongres partai keenam memerintahkan penelitian perihal watak eksploitasi 'feodal' di desa-desa. Penyelidikan dilakukan para kader partai mengenai watak hubungan kelas di pedesaan kemudian dilakukan di Kediri, Surabaya, dan Ngawi di Jawa Timur; Cilacap, Klaten, dan Pekalongan di Jawa Tengah; dan Cirebon serta Bandung di Jawa Barat. Namun, studi-studi mendalam seperti itu memakan waktu yang terlalu panjang dan terlalu abstrak untuk menghasilkan jawaban-jawaban programatik yang

---

Harian Rakjat, 3 Juli, 1965, dari laporan Sudisman untuk rapat pleno keempat Komite Pusat pada rencana pembangunan empat tahun PKI. Lihat juga Sudisman, "Berkompetisi Sosialis untuk Mensukseskan Gerakan 4 Meningkat," *Madju Terus* 1, hlm. 236-238; *Basmi Penjakit Puasdiri*, (Jakarta: Depagitprop CC PKI, 1964).

70 *Harian Rakjat*, 3 Juli, 1965. Sebuah Kampanye untuk peningkatan ideologi diri di antara kader-kader partai, Gerakan Beladjar di luar Sekolah2 Partai (gerakan untuk belajar di luar sekolah-sekolah partai), juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin kader. Ini berfokus pada penguasaan materi-materi yang ditulis oleh Aidit dan pimpinan PKI lainnya yang relevan dengan strategi partai yang sedang dijalankan. Lihat Sudisman, *Kerapian Organisasi* (Jakarta: Pembaruan, 1964), hlm. 5-15.

dikehendaki para pemimpin partai. Akibatnya, Kongres Ketujuh PKI pada 1962 menyerukan studi-studi mengenai hubungan kerja antara tuan tanah dan kaum tani agar dapat merumuskan cara-cara yang sesuai dalam membangun sebuah gerakan untuk menurunkan harga sewa tanah; sebuah penyelidikan menuju hubungan kerja di antara buruh tani dan pemilik tanah untuk merumuskan kampanye peningkatan upah; dan studi spesifik mengenai penggunaan tanah, sistem panen, dan biaya produksi agar dapat meningkatkan produksi dan menetapkan permintaan realistis untuk mereformasi sistem penguasaan lahan.[71]

Beberapa hasil dari kajian-kajian ini dimasukkan ke dalam panduan yang dirumuskan partai untuk para kader yang terlibat dalam upaya-upaya keorganisasian yang menghantar pada kampanye reforma agraria.[72] Namun, ledakan utama dari penelitian PKI dilakukan pada malam kampanye di awal 1964. Penelitian ini tidak diawasi sama sekali oleh lembaga-lembaga PKI atau BTI yang ada, tapi oleh Aidit sendiri yang selama enam minggu memimpin kelompok-kelompok yang meneliti keadaan kecamatan-kecamatan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah saja, Aidit mengawasi kerja dari 56 peneliti yang diambil dari kader-kader partai, para aktivis organisasi massa, akademisi, dan mahasiswa universitas; dan pada gilirannya mereka mengawasi kumpulan bahan-bahan yang dilaporkan oleh 850 pelapor lokal di 29 kecamatan.[73] Sebagaimana upaya-upaya penelitian sebelumnya telah tunjukkan, praktik lumrah melakukan penelitian yang melibatkan para kepala desa dan warga setempat yang terpandang berarti keterangan

71Asmu, “Kembangkan Gerakan Enam Baik untuk Demokrasi, Persatuan dan Mobilisasi!” *Madju Terus* 1, hlm. 203-204.

72 Lihat contohnya artikel panjang mengenai pembagian kelas di desa yang dipublikasikan di *Harian Rakjat*, 18 Januari, 1964.

73 *Ibid*., 30 Mei, 1964, melaporkan sebuah pidato Aidit di Semarang pada 29 Mei, 1964; lihat juga *ibid*., 5 Juni, 1964; dan, untuk contoh usaha riset Jawa Barat, *ibid*., 13 Agustus, 1964, dilaporkan oleh Ismail Bakri. Hasil riset Jawa Barat tidak cocok dengan D.N. Aidit, *Kaum Tani Mengganjang Setan2 Desa* (Jakarta: Pembaruan, 1964); publikasi yang diharapkan dari yang lain tidak ada sebelum kup 1965, tapi (mungkin lebih terus terang dan lebih rinci) laporan-laporan dari hasil riset yang disirkulasikan di internal (Aidit, wawancara, Jakarta, Februari 1965). 70 kecamatan diinvestigasi di Jawa Timur dan 24 di Jawa Barat.

yang diperoleh punya banyak kelemahan dan bias. Oleh sebab itu, kini ditekankan bahwa mereka yang mengunjungi desa-desa dilarang bekerja melalui para elite desa melainkan mesti tinggal, makan, dan tidur di kediaman kaum tani biasa.

Kampanye inilah yang menjadi cikal-bakal laporan-laporan tentang keadaan-keadaan desa yang amat mengesankan rekan Indonesia saya dua puluh lima tahun lalu. Orang-orang yang menulis laporan itu adalah para aktivis pedesaan yang bergiat di tingkat desa dan kecamatan. Di dalam penyelidikan spesifiknya, mereka dipandu para peneliti yang berpendidikan baik, tetapi karena kampanye hanya berlangsung enam minggu dan kebanyakan peneliti yang bukan berasal dari wilayah setempat hanya menghabiskan beberapa hari saja di tiap desa, bagusnya laporan mungkin hanya sedikit saja dipengaruhi oleh kualitas analisis mereka. Tak diragukan bahwa laporan yang bagus ini berasal dari pengaruh jangka panjang pendidikan dan agitasi PKI. Mereka telah belajar melihat lingkungan sekeliling mereka dalam konteks kelas dan kepentingan, telah pula sampai pada kepercayaan bahwa hubungan-hubungan ini bisa diubah, dan bahwa analisis dan organisasi akan membawa pada pemahaman dan peningkatan kualitas.

Dan apa arti penting hal ini bagi masa depan? Banyak sekali dari orang-orang desa yang membawa gagasan-gagasan ini dibantai setelah kudeta. Sementara ketakutan dan kekecewaan menyebabkan banyak orang lainnya yang masih hidup membuang semua yang telah mereka pelajari. Segenerasi penguasa militer yang menyatakan kaum tani sebagai 'massa mengambang' yang mesti tetap lepas dari politik tak mungkin memelihara keyakinan pada pengajaran yang menekankan penggerakan massa semacam ini. Selain itu, runtuhnya komunisme dan bangkitnya Islam sebagai pusat perhatian protes popular di mana-mana di dunia, telah memunculkan pertanyaan atas beberapa dari premis mendasarnya PKI.

Apakah akan ada dan apa peran pergerakan komunis di masa depan Indonesia hanya waktu yang akan menjawabnya. Tetapi keliru apabila memandang arti penting upaya pendidikan PKI hanya dalam pengertian prospek politik gerakannya saja. Upaya tersebut patut dipertimbangkan

juga sebagai bagian dari proses pencerahan yang telah mengubah peradaban Indonesia, mulai dengan 'senyawa progresif' dari Jawa abad kesembilan belas dan mempengaruhi ruas-ruas lebih luas penduduknya. PKI, yang di masa pasca-revolusioner pada dasarnya pergerakan borjuis kecil[74], mentransmisikan gagasan-gagasan baru ihwal modernitas, rasionalitas, dan organisasi ke tingkatan lebih tinggi dari kelas pekerja dan lapis menengah kaum tani. Mereka ditanggapi secara positif karena banyak orang dari kelompok-kelompok sosial ini siap terhadap cara pikir alternatif yang telah menjadi tak bermakna atau hilang dari kehidupan mereka. Pada kekuatan dari pemikiran baru ini, para pegiat di antara mereka menyediakan tulang punggung keorganisasian bagi kaum miskin Indonesia yang lain, yang pertama-tama tertarik pada janji PKI akan keadilan sosial.

Orde Baru belum menghapus keadaan-keadaan yang telah menarik orang pada PKI pascarevolusi. Sebaliknya, penetrasi cepat hubungan-hubungan kapitalis dan peningkatan sarana komunikasi serta pendidikan di wilayah pedesaan, telah turut meningkatkan kecepatan proses detradisionalisasi dan pertumbuhan kesadaran materialis. Selain itu, banyak dari konsep-konsep fundamental yang dipasok komunisme Indonesia juga relevan bagi perkembangan kapitalisme: materialisme, sentralitas hubungan ekonomis di dalam masyarakat, modernitas sebagai sumber kemakmuran, analisis dan rasionalitas sebagai landasan pengambilan keputusan, dan manajemen yang baik sebagai hal penting bagi keberhasilan. Kita bisa berkhayal beberapa pimpinan PKI sebagai manajer bisnis di bawah alur takdir berbeda, dan tentu saja karya-karya kependidikan partai bisa jadi telah menyumbang pada peningkatan potensi kewirausahaan orang-orang Indonesia. Dengan demikian, dalam hal tertentu, ideologi PKI dan Orde Baru ialah saluran-saluran berbeda dari arus yang sama, yang sumbernya ialah mitos agung modernitas. Pada saat bersamaan, nilai-nilai keikutsertaan rakyat banyak dan keadilan sosial yang didorong PKI memang ditekan tapi jelas belum dilupakan; mereka menggema dalam desakan-desakan—sekarang redup, tapi sedang diolah—akan suatu pengakuan baru terhadap orang-orang Indonesia kebanyakan.***

74 Aidit, dikutip di *Harian Rakjat*, 7 Februari 1965; dan lihat survei keanggotaan partai yang dibuat publik pada kongres PKI tahun 1962: P. Pardede, "Laporan Komisi Mandat kepada Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI," *Madju Terus* 1, hlm. 168.

Ruth T. McVey *adalah mantan profesor* di Cornell University, AS. Menulis beberapa buku tentang Indonesia, seperti The Rise of Indonesian Communism dan A Preliminary Analysis of the October I, 1965 Coup in Indonesia, *yang ditulisnya bersama Ben Anderson*.